

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PAKET C  
DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  
KABUPATEN SINTANG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**M U S R I A H**

**NIM. 014944965**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

**2010**



**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

**Judul TAPM** : **Implementasi Program Pendidikan Non Formal Kelompok Belajar (Kejar) Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

**Penyusun TAPM** : **Musriah**

**NIM** : **014944965**

**Program Studi** : **Adimistrasi Publik**

**Hari/tanggal** : **22 Oktober 2010**

**Menyetujui:**

**Pembimbing II,**



**Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA**  
Nip. 194510071973021001

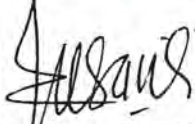
**Pembimbing I,**



**Dr. Fatmawati, M.Si**  
Nip: 196004071990032001

**Mengetahui,**

**Ketua Bidang ISIP**



**Dra. Susanti, M.Si**  
Nip. 196712141993032002



**Direktur Program Pascasarjana**



**Suciati, M.Sc, Ph.D**  
Nip. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**Nama** : Musriah  
**NIM** : 014944965  
**Program Studi** : Administrasi Publik  
**Judul Tesis** : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PAKET C DI SANGGAR KEGIATAN BELJAR (SKB) KABUPATEN SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Sidang panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 22 Oktober 2010

Waktu : 09.45 – 11.45 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

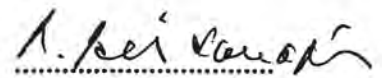
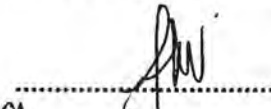
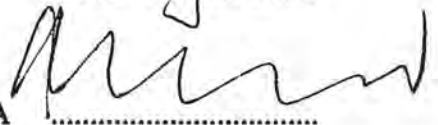
**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, M.M.  
 NIP. 19592181986031003

Penguji Ahli : Dr. A. Aziz Sanapiah, MPA

Pembimbing I : Dr. Fatmawati, M.Si  
 NIP. 196004071990032001

Pembimbing II : Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA  
 NIP. 194510071973021001

**ABSTRAK****Implementasi Program Pendidikan Non Formal Kelompok Belajar (Kejar) Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang****Musriah****NIM: 014944965****Email: musriahmap@yahoo.com****Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak****Kata Kunci: Implementasi, Kejar, Paket C, SKB**

TAPM ini mengangkat masalah Implementasi Pendidikan Non Formal Kelompok Belajar (Kejar) Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun ajaran 2006/2007. Berdasarkan SK Bupati No. 383 tahun 2000 SKB Kabupaten Sintang berfungsi sebagai unit percontohan pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah. Latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan banyaknya siswa lulusan SMP putus sekolah. Permasalahan lain karena terbatasnya dana dan tenaga pengajar mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di SKB Kabupaten Sintang tidak berjalan efektif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Program Kelompok Belajar Paket C dan faktor pendukung serta faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Adapun subjek penelitian sebagai data primer adalah para staf dan tutor/tenaga pengajar serta warga belajar. Hasil penelitian menjelaskan yang terjadi di lapangan bahwa implementasi program Kelompok Belajar Paket C berdasarkan kurikulum tahun 2004 berisi standar kompetensi tiap-tiap mata pelajaran. Penyusunan standar kompetensi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, lebih fleksibel, dan muatan isi materi lebih disederhanakan. Pelaksanaan program kejar Paket C tahun ajaran 2006/2007 hanya ada satu program studi yakni program Studi IPS, jumlah kelas terdiri dari kelas 1 dan kelas 3. Kegiatan belajar dilaksanakan enam semester, dengan jadwal belajar 3 hari dalam satu minggu pada sore hari. Faktor pendukung terlaksananya kegiatan Kejar paket C karena adanya komitmen pemerintah berupa dana BOP Paket C dan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Faktor peluang tenaga kerja juga memberikan motivasi kepada siswa putus sekolah meneruskan sekolah. Adapun faktor penghambat program disebabkan faktor geografis Kabupaten Sintang yang luas dan lokasi SMA yang jauh mengakibatkan banyak siswa yang putus sekolah. Faktor lainnya karena rendahnya ekonomi keluarga dan kurangnya kesadaran orang tua mengakibatkan rendahnya minat siswa untuk meneruskan sekolah.

**ABSTRACT****Implementation of Non-Formal Education Program Study Group (Chase) C Package  
at Studios Learning Activities Kabupaten Sintang**

Musriah

NIM: 014944965

Email: musriahmap@yahoo.com

Open University UPBJJ Pontianak

**Keywords: Implementation, Study Group, C Package, SKB**

This raised the question TAPM Implementation of Non-Formal Education Study Group Package C at Sintang Learning Activities (SKB) Sintang 2006/2007 school year. Based on Regent Decree No. 383 year 2000 SKB Sintang served as a pilot unit implementation Out of School Education. The background of this research problem was the low socioeconomic conditions has resulted in many junior high school students drop out of school graduates. LCS in Package C program did not accommodate all the drop out students. Other problems were because of limited funding and lack of teachers resulted in the ineffective implementation of LCS activities. The purpose of this study was to analyze Study Group Program Package C and factor endowments as well as inhibiting factors. This research used descriptive method, using observation techniques and in-depth interviews. The subject of study for the primary data are the civil staff and teachers / faculty and students in the LCS Sintang. The research explains what's happened on the ground that the implementation of the program package C Study Group in 2004 based on the curriculum standards of competence of each subject. Formulation of competency standards adapted to the characteristics of learners, more flexible, and loads more simplified content. The implementation of Package C program after the school year 2006/2007 there was only one course of Social Studies program, the number of class consists of class 1 and class 3. Activities were implemented in a semester, learning activities in 3 days a week in the afternoon. Factors supporting the implementation of packet C Pursue activities because of the government's commitment of funds and the BOP package C funding from local governments Sintang. Employment opportunities factors also provide motivation for students to go to school dropouts. The inhibiting factor is caused program Sintang district geographic factors are broad and distance of locations which resulted in high school with high drop out rate. Other factors due to low family economy and lack of awareness of parents resulted in low interest student to continue school.

**HALAMAN PERSEMBAHAN****KUPERSEMBAHKAN TESISKU YANG BERJUDUL**

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PAKET C DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SINTANG, SEBAGAI TANDA PERJUANGAN UNTUK KEBAHAGIAAN ORANG-ORANG YANG SAYA CINTAI.

1. TUHAN YANG MAHA ESA
2. KEDUA ORANG TUA SAYA, BAPAK ( ALMARHUM ) DAN IBU YANG TELAH MELAHIRKAN DAN MEMBESARKAN SAYA KEDUNIA INI.
3. SUAMI YANG TERCINTA: BAGIYO SUGIHARTO YANG SETIA MENEMANI SAYA SELAMA INI.
4. ANAK-ANAK YANG KU SAYANG
  - A. AULIYAK SUGIHARTO
  - B. NAHDHIAH ULYA SUGIHARTO
  - C. AZIZA SUGIHARTO
5. SEMUA TEMAN-TEMAN SAYA YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN SELAMA PROSES MENYELESAIKAN TESIS INI.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidayah dan karuniaNya sehingga TAPM yang berjudul: “Implementasi Program Pendidikan Non Formal tentang Kelompok Belajar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang” terselesaikan dengan baik. TAPM ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam terutama kepada yang terhormat Ibu Dr. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. H. Udin S. Winatapura, MA sebagai Pembimbing II dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membimbing penulisan TAPM. Dalam kesempatan berbahagia ini, Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph. D Rektor Universitas Terbuka.
2. Suciati, Ph.D. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ir. Edward Zubir, M.M selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak.
4. Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Semua Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
6. Kepala dan para Staf Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan saran, masukan dan dorongan hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu keberhasilan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran-saran positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara kepada penulis agar mendapat balasan yang setimpal dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang, Desember 2010  
Penulis

**Musriah**  
**NIM. 014944965**

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Lembar Pernyataan .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Bagan .....	xii
BAB I	PENDAHULUAN .....
	1
	A. Latar Belakang Masalah .....
	1
	B. Perumusan Masalah .....
	7
	C. Tujuan Penelitian .....
	7
	D. Manfaat Penelitian .....
	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA .....
	9
	A. Kajian Pustaka .....
	9
	1. Kebijakan Publik .....
	9
	2. Proses Kebijakan Publik .....
	11
	3. Proses Kebijakan Publik Menurut Harold Laswell .....
	12
	4. Konsep Implementasi .....
	14
	5. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....
	20
	6. Konsep Pendidikan Non Formal .....
	23
	B. Kerangka Pemikiran .....
	30
	C. Definisi Konsep .....
	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....
	32
	A. Jenis Penelitian.....
	32
	B. Lokasi Penelitian.....
	32
	C. Subjek Penelitian.....
	33
	D. Teknik Pengumpulan Data.....
	33
	E. Alat Pengumpulan Data.....
	34
	F. Teknik Analisis Data.....
	35
	G. Keabsahan Data.....
	36
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....
	38
	A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang.....
	38
	1. Keadaan Geografi dan Demografi.....
	38
	2. Pendidikan .....
	42
	B. Gambaran Umum Kelembagaan SKB Kabupaten Sintang.....
	45
	1. Sejarah Berdirinya SKB Kabupaten Sintang.....
	45
	2. Fungsi SKB Kabupaten Sintang.....
	46

3.	Sumber Daya Sarana Dan Prasarana.....	53
4.	Kondisi Perpustakaan.....	55
5.	Kurikulum SKB Kabupaten Sintang.....	56
6.	Struktur Organisasi Pelaksana Program.....	57
7.	Kurikulum Pembelajaran Paket C.....	60
C.	Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar Program Paket C Kabupaten Sintang.....	65
1.	Persiapan Program SKB Kabupaten Sintang.....	66
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Paket C.....	75
3.	Luaran/Lulusan Program.....	84
D.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Paket C Di SKB Kabupaten Sintang.....	88
1.	Faktor Sumber Daya.....	88
a.	Ketersediaan Dana Berupa BOP untuk Paket C.....	89
b.	Peluang Lapangan Kerja.....	96
c.	Kondisi Giografis.....	98
d.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	100
e.	Faktor Kesadaran Orang Tua dan Anak.....	102
2.	Faktor Komunikasi.....	104
3.	Faktor Dsiposisi/Sikap/Komitmen Pemerintah Daerah . Kabupaten.....	106
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	111
A.	Simpulan.....	111
B.	Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	115
Lampiran 2 : Pedoman Observasi.....	116
Lampiran 3 : Daftar Informan.....	117
Lampiran 4 : Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 5 : Pemohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM).....	136
Lampiran 6 : Izin Penelitian.....	137
Lampiran 7 : Peta Penelitian.....	138
Lampiran 8 : Gambar Penelitian.....	139
Lampiran 9 : Riwayat Hidup.....	144

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR BAGAN**

1.	Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran	30
2.	Bagan 4.1	Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Sintang.	60

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2004 adalah 66,20 dan di lihat dari tingkat nasional menunjukkan masih di bawah rata-rata yakni pada peringkat 27. Berdasarkan indek pembangunan tersebut dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia di Kalimantan Barat dapat dikatakan masih rendah. Dipertegas menurut Azazi (<http://www.pontianakpost.com>), bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat berada pada peringkat 27 dari 33 propinsi di Indonesia. Hasil indeks pembangunan nasional yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran riil tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumber daya manusia Kalimantan Barat masih ketinggalan dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Indeks pendidikan di Kalimantan Barat juga masih di bawah rata rata. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan dalam website (<http://www.bps.go.id>), rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Barat adalah 6,6 tahun padahal rata-rata nasionalnya adalah 7,3 tahun. Rata-rata angka melek huruf nasional adalah 90,9 sedangkan rata-rata Kalimantan Barat adalah 89,0. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang tahun 2006 juga termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah propinsi Kalimantan Barat. Indeks harapan hidup penduduk Kabupaten Sintang 67,5 tahun, angka melek huruf 86,2 persen, rata-



rata lama sekolah 6,2 tahun, dan rata-rata pengeluaran riil 597,2 ribu. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang adalah 65,7. Indeks ini juga di bawah rata-rata Kalimantan Barat yaitu 67,1.

Salah satu rendahnya indeks pendidikan di Kabupaten Sintang adalah banyaknya angka putus sekolah pada masyarakat/anak usia sekolah. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2008, jumlah putus sekolah tahun 2007/2008 terbesar adalah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) yaitu sebesar 5.093 orang, disusul Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) sebesar 735 orang. Jumlah paling sedikit adalah putus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yaitu 47 orang. Dari data tersebut jumlah terbesar yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) adalah di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs). Besarnya jumlah angka putus sekolah mempengaruhi kualitas masyarakat di Kabupaten Sintang dan indeks pendidikan yang rendah pula.

Besarnya jumlah warga masyarakat yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor sosial ekonomi. Pada umumnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan kondisi sosial ekonomi cukup rendah. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) berada di ibukota kabupaten. Apabila orang tua menyekolahkan anaknya berarti harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, biaya tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat. Sebaliknya bila anak tidak melanjutkan sekolahnya mereka bisa

membantu pekerjaan orang tuanya atau bahkan lepas dari beban orang tuanya karena sudah mendapatkan penghasilan sendiri.

Faktor lainnya adalah karena kurangnya kesadaran orang tua. Pada umumnya kebanyakan orang tua di Kabupaten Sintang latar belakang tingkat pendidikan cukup rendah, rata-rata hanya tamatan Sekolahn Tingkat Dasar (SD dan MI) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs). Hal ini berpengaruh terhadap motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak. Lingkungan masyarakat berpendidikan rendah juga berpengaruh terhadap motivasi anak untuk bersekolah atau mengikuti pendidikan.

Faktor geografis juga berpengaruh terhadap besarnya anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Di daerah perkotaan, sekolah relatif mudah dijangkau, namun di daerah-daerah pelosok untuk dapat bersekolah diperlukan perjuangan. Selain sekolah tempatnya relatif jauh, alat transportasi tidak mudah dan medan yang dilalui juga lebih sulit.

Berdasarkan beberapa permasalahan banyaknya anak putus sekolah dapat dikatakan mereka tidak mempunyai wawasan berpikir yang luas dan tidak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekal mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya mereka hanya menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Beranjak dari itu untuk menampung mereka yang putus sekolah maka mereka merupakan sasaran program pemerintah agar dapat tertampung atau melanjutkan sekolah melalui pendidikan kesetaraan melalui pendidikan nonformal yang diselenggarakan didaerahnya masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan nonformal merupakan bagian dari amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45). dalam pasal 31 Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Amanat undang-undang tersebut diatur melalui peraturan yang berbeda di tiap jenjangnya. Di tingkat pusat diatur melalui undang undang pendidikan. Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pelaksanaan di lapangan diatur melalui Surat Keputusan Bupati yang menentukan pihak atau lembaga diberi tugas untuk melaksanakannya.

Bupati Sintang telah mengeluarkan surat keputusan yang secara khusus mengatur lembaga yang mengelola pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurut Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengelola pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit Pelaksana Teknis yang secara khusus mengelola pendidikan non formal. Dalam Surat Keputusan Bupati nomor 383 Tahun 2000 tertanggal 29 Desember 2000, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan UPT Dinas Pendidikan yang mengelola pendidikan non formal. Pada saat ini ada beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, kursus, pelatihan dan lain-lain. Program kesetaraan yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai bagian dari lembaga pemerintah

yang bergerak dalam pendidikan nonformal adalah Paket A setara Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI), Paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs), dan Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA).

Adapun salah satu tujuan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah untuk memberikan pemerataan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Ketiga program paket kesetaraan tersebut merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang setiap tahunnya sebagai komitmen untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Demikian pula Kelompok Belajar Paket C merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal pada pendidikan kesetaraan. Program Paket C bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Paket B, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) yang tidak tertampung pada pendidikan formal serta siswa putus sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) agar memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilaksanakan oleh pendidikan formal.

Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Sintang melakukan kegiatan program Paket C pada tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang dinamakan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional. Pelaksanaan kegiatan Paket C dilakukan secara berkesinambungan selama 3 tahun, mulai dari Tahun ajaran 2006/2007 telah meluluskan sebanyak 30 orang warga belajar dan 10 orang warga belajar belum lulus.

Jika dibuat perbandingan angka putus sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) sebanyak 5.093 orang, dan daya tampung kegiatan pendidikan kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang hanya menerima sebanyak 40 warga belajar, pada kenyataannya sebagian besar tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) bisa tertampung di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Hal ini mengindikasikan bahwa indek pendidikan Kabupaten Sintang dapat dikatakan masih rendah.

Sebagaimana diketahui keberadaan desa-desa yang menyebar dengan kondisi geografis Kabupaten Sintang yang luas serta medan yang cukup berat membuat masyarakat tidak bisa meneruskan sekolah ke Sintang. Berdasarkan indikasi tersebut pelaksanaan kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang mengalami kendala, sebagian besar warga belajar tidak bisa melanjutkan sekolah karena lokasi pelaksanaan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang ternyata belum bisa menjangkau masyarakat yang berminat meneruskan sekolah.

Permasalahan lainnya pada jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tidak sebanyak waktunya yang dilaksanakan oleh pendidikan formal di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA). Jadwal yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu pada sore hari dan dilaksanakan selama 6 semester setiap angkatan.

Berdasarkan waktu yang relatif singkat tentunya muatan materi pelajaran relatif sedikit pula, walaupun materi pelajaran lebih disederhanakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan tempat kegiatan belajar berlangsung.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana implementasi program pendidikan nonformal Kelompok Belajar (Kejar) Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan nonformal di Kabupaten Sintang dengan proses sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan pendidikan nonformal Program Kejar Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan belajar (SKB) Kabupaten Sintang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang Kejar Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Kajian terhadap suatu kebijakan pemerintah sangat berguna untuk menilai suatu kebijakan yang telah disahkan oleh suatu lembaga yang berwenang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Ketepatan kebijaksanaan tersebut akan dapat dinilai dengan melihat data yang diperoleh dari hasil pengkajian lapangan. Hasil kajian akan merupakan informasi penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan yang tepat terkait dengan kebijakan yang telah diambil, apakah perlu ada kebijakan baru atau melanjutkan kebijakan yang telah ada.

Dalam membahas mengenai implementasi suatu kebijakan, perlu dipahami beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Beberapa hal penting yang terkait adalah mengenai pengertian kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang dibahas, pengertian implementasi kebijakan, dan lembaga yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karena suatu kebijakan diambil sebagai salah satu langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka dipahami pula pihak yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

#### 1. Kebijakan Publik

Secara harfiah kata kebijakan terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1971: 6-8). Selanjutnya menurut beberapa ahli seperti William Dunn, Charles Jones (Islamy,2000) menggunakan istilah *public policy* dalam pengertian yang

hampir sama. Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umum.

Defenisi tentang kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Dye (1978) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya dipertegas oleh Carl J. Friederick (Islamy,2000), kebijakan adalah

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Di antara definisi mengenai kebijakan tersebut, terdapat beberapa kesamaan. Kismartini dkk. (2005:1.6) menyimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa hal. Hal tersebut adalah: a) tujuan tertentu yang ingin dicapai, b) serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, c) usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan dan d) penyedia *input* untuk melaksanakan strategi.

Dari uraian di atas jelas bahwa berupa kebijakan tidak hanya berupa keputusan sepele, tetapi juga terkait dengan konsekuensi yang harus ditanggung sebagai akibat dari keputusan tersebut. Setelah adanya tujuan dicapai, maka pengusul membuat program atau kegiatannya, dan juga menyediakan input. Input tersebut mencakup beberapa hal yang diperlukan termasuk peraturan dan pendanaan.



Istilah publik mengandung beberapa pengertian. Kata “publik” dapat berarti “umum, rakyat, masyarakat, publik, negara, atau pemerintahan” Pemanfaatan kata publik tergantung pada konteks yang menyertainya. Istilah “publik” dalam konteks kebijakan publik mengarah pada pemerintah. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa hal itu adalah karena pemerintah memiliki ketiga kewenangan yang diperlukan. Kewenangan tersebut adalah dalam : a) endorong, b) melogitimasi agar dapat diberlakukan, dan c) melaksanakan kebijakn tersebut (Kismartini, 2005:1.10).

Kebijakan publik secara sederhana disebut sebagai “apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. (Kismartini, 2005:1.8) Secara lebih rinci lagi, kebijakan publik adalah:

apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program.

## 2. Proses Kebijakan Publik

Suatu kebijakan dikeluarkan setelah melalui suatu proses yang disebut proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan publik (Budi Winarno, 2002). Pembuatan kebijakan ini merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang terdiri dari serangkaian keputusan. Proses kebijakan publik ini mencakup suatu proses yang rumit. Proses ini meliputi (Kismartini, 2005:1.46); a). Melibatkan percabangan yang luas. b). Melibatkan prespektig jangka panjang.c). Menggunakan sumber-sumber

kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah. d). Merupakan proses intelektual. e). Kelanjutan proses sosial yang dinamis.

### 3. Proses Kebijakan Publik menurut Harold Laswell

Ada beberapa model proses kebijakan publik. Model-model tersebut di antaranya disampaikan oleh Jones dan Brewer. Jones (1984:53) berpendapat bahwa proses kebijakan publik mencakup beberapa tahapan, yaitu a) *perception/definition*, b) *aggregation*, c) *organization*, d) *representation*, e) *agenda setting*, f) *legimitation*, g) *budgeting*, h) *implementation*, i) *evaluation*, dan j) *adjustment/termination*. Model kebijakan menurut Brewer mencakup tahapan: a) *inventzation/initiation*, b) *estimation*, c) *selection*, d) *implementation*, e) *evaluation*, dan f) *termination*.

Model Laswell (1989:67-70) lebih sederhana dibandingkan dengan model Jones dan terdiri dari 7 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

(a). **Intelligence.** Pada tahap ini data dan informasi dikumpulkan, diproses, dan diseminasi. Jones menyebutkan sebagai mendefinisikan masalah (*perception/definition*). Suatu kebutuhan dirasakan sehingga memunculkan suatu wacana diperlukannya suatu kebijakan baru. Dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah, perimbangan-pertimbangan diperlukannya pembentukan wilayah pemekaran baru dimunculkan sebagai suatu wacana untuk direalisasikan.

(b). **Promotion.** Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang menginginkan adanya suatu kebijakan dengan mempengaruhi pembuat kebijakan agar merealisasikan kebijakan publik tersebut. Jones menyebutnya sebagai tahapan *organization*, *respresentation*, dan *agenda setting*. Setelah adanya wacana kebijakan yang telah

dimunculkan dalam tahap pertama, orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dikumpulkan dan dikelola ke dalam suatu organisasi formal ataupun non formal, dan digerakkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan sehingga memasukkannya ke dalam agenda kebijakan yang akan dibuat. Dalam tahap ini bisa terjadi pengelompokan antara orang yang mendukung diadakannya kebijakan baru dan yang menolak seperti rencana pemekaran suatu wilayah.

(c). *Prescription*. Pada tahap ini, masalah diformulasikan agar dapat diselesaikan melalui pengusulan, seleksi dan penilaian alternatif. Tahap ini adalah tahap penggodokan suatu usulan apakah ditindaklanjuti atau tidak. Tindak lanjut usulan dapat diterima sebagaimana usulannya, ditolak atau dilakukan alternatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Berbagai kepentingan menjadi pertimbangan sehingga dicari jalan keluar yang paling tepat dari konflik kepentingan yang ada dari pihak pengusul dan penolak disahkannya suatu kebijakan.

(d). *Invocation*. Pada tahap ini kebijakan public disahkan dan diberlakukan beserta penentuan sanksi bagi pelanggarnya. Dari hasil usulan dan pembahasan diputuskan untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk suatu surat keputusan. Keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan keputusan ini.

(e). *Application*. Tahap pelaksanaan kebijakan publik dengan atau belum adanya dana. Istilah lain dari tahap ini adalah *implementation*. Menurut Huki Kurniawan (2008, <http://hykurniawan.wordpress.com>) mengatakan bahwa pelaku utama dari kebijakan ini adalah berasal dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah

diputuskan direalisasikan ke dalam tindakan riil dengan berbagai konsekuensinya termasuk yang terkait dengan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan

(f). *Termination*. Tahap ini adalah tahap penyesuaian kebijakan publik dengan kelompok sasaran. Penerapan kebijakan yang telah dilaksanakan, dipantau, dan dinilai sebagai bahan pertimbangan agar dapat diterapkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran tanpa menyelisihi dari kebijakan yang ada. Hal-hal yang mendukung aplikasi kebijakan diperkuat dan hal-hal yang menghambat diatasi. Kelemahan-kelemahan teknis seperti kurang tepatan sasaran kebijakan diperbaiki agar mencapai tujuan yang ingin dicapai dari aplikasi kebijakan tersebut.

(g). *Appraisal*. Pada tahap ini kebijakan ditemukan faktor penghambat dan pendukungnya beserta untuk dapat diketahui apakah suatu kebijakan diperbaiki atau diakhiri. Dari penilaian diketahui apakah aplikasi kebijakan masih perlu dilanjutkan dengan atau tanpa perubahan terhadap kebijakan tersebut, atau tujuan sudah tercapai dan tidak perlu untuk dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut saling berkaitan dan saling mengisi, apabila salah satu faktor tidak terlaksana dengan baik, maka faktor lain akan terpengaruh dan akan terganggu.

#### 4. Konsep Implementasi

##### a. Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (1971:1135) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide instruments or means of practical expression for*” atau “menyediakan instrument atau alat dari suatu perwujudan nyata. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa

implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991:112), dimana implementasi diartikan sebagai “*getting the job done*” (menyelesaikan pekerjaan) dan “*doing it*” (mengerjakannya). Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones (1991) menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn (1970:70) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: “*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*” Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al (1994:13), menggunakan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variable yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Horn (Samudra Wiboro et al, 1994:89) dalam teorinya ini beranjak dari argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pada pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan model-model tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? (Masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikan masing-masing orang dalam organisasi? (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn (Samudra Wiboro et al, 1994:93) kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu, standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif di antara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam



melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam batasan wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggara atau pelaksana kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan di atas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi tanggapan implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standar dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Di samping karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan

sasaran organisasi, dalam mana implementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

### **5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (1980, 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, yaitu faktor sumberdaya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

(a). **Faktor sumberdaya (*resources*)**. Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup (1) Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, (2) Perintah dan (3) Anjuran atasan atau pimpinan. Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah dari staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara

mengimplementasi suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

**(b). Struktur Birokrasi.** Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

**(c). Faktor Komunikasi.** Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain (The Liang Gie, 1982). Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang

melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

**(d). Faktor Disposisi (Sikap).** Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup (a) Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, (b) Perintah dan (c) Anjuran atasan atau pimpinan. Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah dari staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## 6. Konsep Pendidikan Non Formal

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Secara implisit tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas dan moral manusia Indonesia. Demi mewujudkannya, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional membuat kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar 9 tahun, bagi anak-anak usia 7-15 tahun harus mengenyam pendidikan dasar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sasaran utama program wajib belajar adalah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil/terisolir.

Realitas sosial menggambarkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan formal oleh berbagai sebab seperti kondisi kemiskinan. Untuk itu pendidikan non formal dalam hal ini pendidikan luar sekolah dapat membantu masalah anak yang putus sekolah pada pendidikan formal. Pada Bab VI Pasal 13 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pendidikan non formal mempunyai fungsi khusus, yakni fungsi ini untuk mendukung fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada pasal 6 menyatakan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan kepribadian professional. Program pendidikan yang dicanangkan pemerintah dapat ditempuh melalui beberapa jalur pendidikan. Wahana yang dilalui peserta didik tersebut terbagi menjadi tiga jalur. Jalur tersebut terdiri dari jalur pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi.

Menurut Putra (Just another Wordpress.com, 2007), menyatakan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui Pendidikan nonformal berbasis masyarakat. Pendidikan non formal berbasis masyarakat yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Upaya mendorong pada terwujudnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat, maka diperlukan upaya untuk menjadikan pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang tepat akan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Putra (2007) mengatakan bahwa Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan Undang Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. jalur yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Konteks pembangunan atau pengembangan masyarakat khususnya masyarakat desa merupakan suatu fondasi penting yang dapat memperkuat dan mendorong makin meningkatnya pembangunan bangsa, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan nonformal dapat menjadi suatu yang memberi makna besar bagi kelancaran pembangunan. Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kerjasama menentukan jenis-jenis pendidikan non formal yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Lebih lanjut Putra (2007) mengatakan penyelenggaraan pendidikan nonformal diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelempak pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Lebih lanjut menurut Isjoni dalam artikelnya berjudul Pendidikan Luar Sekolah (2004), mengatakan bahwa dalam semangat Otonomi Daerah Pendidikan Luar Sekolah memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja baru sehingga bisa mengurangi pengangguran. Adapun strategi Pendidikan Luar Sekolah dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah; (2) Pembinaan kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS); (3) Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat; (4) Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); dan (5) Meningkatkan fasilitas di bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Berdasarkan pendidikan non formal, terlebih dahulu dijelaskan definisi pendidikan non formal. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia (2008), ensiklopedia bebas tentang pendidikan non formal menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan



mengacu pada standar nasional pendidikan. Sedangkan sasaran pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya fungsi pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Adapun jenis pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bentuk pendidikan non formal berupa sanggar dapat dijelaskan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (2008). Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Selama ini sanggar biasa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: (a). Sanggar ibadah, yakni tempat untuk beribadah, biasanya ditempatkan di halaman belakang rumah (b). Sanggar seni, yakni tempat untuk

Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang melalui lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 383 Tahun 2000. Selanjutnya dijelaskan pada Bab 1 pasal 1, definisi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan upaya pelayanan di bidang kegiatan belajar secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu yang selanjutnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. SKB salah satu lembaga di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional di bawah Direktorat Pendidikan Luar Sekolah yang mendapat amanat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan non formal. Untuk itu, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang diberi tugas dan fungsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang memberikan alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat anak usia sekolah yang putus sekolah. Mereka diharapkan bisa mendapatkan pelayanan pendidikan sebagai amanat pendidikan nasional.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 383 Tahun 2000 tertanggal 29 Desember 2000, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Pendidikan yang mengelola pendidikan non formal. Dalam Surat Keputusan

tersebut diuraikan susunan organisasi dan tata kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Berdasarkan program tersebut terdapat program kesetaraan pendidikan nonformal yakni program Paket A, Paket B, dan Paket C. Untuk program kesetaraan paket A setara Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) dan Peket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs), dan Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA). Selanjutnya penelitian ini dibatasi pada program paket C setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA).

## B. Kerangka Pemikiran

### Kerangka Pikir Alur Penelitian



Keterangan Bagan 1 : Kerangka Pikir Alur Penelitian

### C. Defenisi Konsep

1. Pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan dari pemerintah.
2. Program yakni rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan
3. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan
5. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan pelayanan upaya di bidang kegiatan belajar secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
6. Program Belajar Paket C adalah merupakan bentuk layanan pendidikan non formal pada pendidikan kesetaraan. Program Paket C bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Paket B, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) yang tidak tertampung pada pendidikan formal serta siswa putus sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) agar memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh pendidikan formal.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2001:630), yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Oleh karena dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang implementasi pendidikan non formal.

Pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan kualitatif mengungkap makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Metode kualitatif menurut Moleong (2002:4) adalah sebagai prosedur penelitian yang mengumpulkan data deskriptif baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap dan perilaku orang yang diamati.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kecamatan Sungai Tebelian yang berada di wilayah Kabupaten Sintang dengan pertimbangan bahwa:

1. Wilayah kecamatan tersebut terjangkau oleh peneliti.
2. Kecamatan tersebut terdapat kegiatan Paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian.

### **C. Subyek Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informan kunci yaitu para pegawai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dan peserta didik / warga belajar. Penelitian dilakukan secara *purposive* (telah ditentukan sebelumnya) sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti. Informan lain ditambah informan pelengkap yaitu berasal dari warga masyarakat dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Sedangkan data sekunder adalah berupa referensi-referensi yang terkait dengan konteks penelitian dan referensi pendukung berasal dari kantor pemerintah dan pustaka.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, maksudnya peneliti tidak terlibat langsung dengan apa yang dilakukan oleh informan, tetapi

tugas peneliti melakukan observasi terhadap situasi terhadap kegiatan-kegiatan informan.

## **2. Wawancara mendalam (*indepth interview*)**

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sehingga konteks kebudayaan secara realitas dan akurat dapat diungkapkan dengan tujuan untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam dalam menyimpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat (Moleong, 2000). Selanjutnya informan yang berasal dari instansi terkait dan pemuka masyarakat telah memberikan sejelas mungkin, sehingga peneliti memperoleh data yang diperlukan. Hal itu juga dilakukan ketika melakukan kunjungan pada informan.

## **3. Studi dokumenter**

Studi dokumenter adalah pengumpulan data tertulis dari sumber dan objek penelitian yang berbentuk Surat Keputusan dan lain lain.

### **E. Alat Pengumpul Data**

Selanjutnya alat pengumpul data lapangan berupa:

1. Pedoman Observasi dimaksudkan untuk memudahkan melakukan observasi lapangan, dengan daftar check list.
2. Pedoman wawancara disusun dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan perolehan data yang diberikan oleh informan. Pedoman observasi tidak diberikan kepada informan, atau dibacakan, tetapi berfungsi sebagai panduan ketika



melakukan wawancara. Peneliti telah mengetahui dengan jelas kira-kira isi wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.

3. Dokumentasi, adalah berupa peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian seperti alat tulis, kertas, tape recorder dan kamera digital.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian (Muhajir, 1998:97).

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang berlangsung. Peneliti sebagai alat instrument data sekaligus alat pengumpul data. Langkah awal pendekatan kualitatif, telah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui. Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan. Selanjutnya secara garis besar menurut Muhajir (1998:29-33), bahwa analisis data mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data, (2) penyajian data, yaitu berupa sajian pokok-pokok atau garis besar data yang kesahihannya terjamin, (3) simpulan dan verifikasi. Simpulan disusun secara tentatif guna diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan langkah yang telah diungkap, maka dalam kegiatan analisa data dalam penelitian melakukan pemilahan-pemilahan data yang terjaring yang

mempunyai konsep yang sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian disusun secara sistematis data yang lebih sesuai. Kemudian diteliti kembali secara cermat mana data yang sesuai dan mana yang kurang sesuai. Setelah data dianggap cukup dan telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun kesimpulan.

Keabsahan data atau data yang dianggap benar-benar sesuai dengan konteks penelitian agar datanya tidak bisa.

#### **G. Keabsahan Data**

Adapun sifat keabsahan data dilihat dari obyektivitas dalam subyektivitas, untuk mendapat data yang obyektif berasal dari unsur subyektivitas obyek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realita sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada. Pandangan subyektivitas menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami, oleh karena itu sering disebut studi humanistic. Pengetahuan mempunyai sifat yang obyektif dan sifat yang tetap tetapi selalu berubah-ubah dan bersifat interpretative. Realitas sosial adalah suatu kondisi yang mudah berubah-ubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, fenomena yang ada hanya bersifat sementara. Dalam hal inilah pandangan obyektif mampu mencari keabsahan datanya.

Tahapan selanjutnya teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dan selanjutnya peneliti menggunakan cek ricek dengan informan. Peneliti menemui kembali beberapa informan yang dianggap bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan, kemudian mendiskusikannya dengan intensif, dengan

membandingkan dari hasil wawancara yang telah disusun kepada beberapa informan, sehingga menghasilkan data yang akurat yang sesuai dengan konteks penelitian. Adapun maksudnya adalah agar terdapat “titik temu “ kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran antara peneliti dengan informan. Selain melakukan ricek dengan informan peneliti juga melakukan ricek dengan literatur yang mendukung keabsahan data.

Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensial yang sesuai dengan konteks penelitian. Sebagai hasil pembanding terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, kamera foto digital dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

##### 1. Keadaan Geografi dan Demografi

Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan yang terbagi dalam 176 desa dengan luas wilayah seluruhnya 21.635 Kilometer persegi. Wilayah kecamatan terluas adalah Kec.Ambalau yaitu 6.386,40 Km persegi atau sebesar 29,52 persen dan wilayah yang terkecil adalah Kec. Sintang dengan luas 277,05 Km persegi atau sekitar 1,28 persen. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan dengan luas lebih kurang dari 14.499 Km, dengan kondisi pemukiman penduduk terpencar. Adapun kondisi tanah Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- a. Tanah Organosol                      45.056 Hektar
- b. Tanah Aluvial                         173.324 Hektar
- c. Tanah Podsolit                        928.014 hektar
- d. Tanah Latosol                         1. 016.606 Hektar

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang adalah 357.479 jiwa. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1: Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2007.**

Penduduk		Jumlah
Laki-laki/Jiwa	Perempuan/Jiwa	
181.652	173.827	357.479

Sumber Data: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2008.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan relatif seimbang. Menurut rasio prediksi berdasarkan data Tahun 2007 penduduk Kabupaten Sintang bertambah 1,84 persen pertahun dengan angka kelahiran sebesar 0,2 persen dan angka kematian 0,01 persen. Angka migrasi ke luar Kabupaten Sintang diperkirakan sebesar 0,29 persen pertahun dan migrasi ke dalam sebesar 0,48 persen pertahun. Dari catatan tersebut mengindikasikan bahwa perbandingan angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian. Sedangkan perbandingan angka migrasi ke luar dan migrasi ke dalam, maka migrasi ke dalam lebih besar, hal ini disebabkan penduduk yang mengadakan tujuan migrasi penduduk ke Kabupaten Sintang karena kepindahan tempat kerja, mencari pekerjaan/usaha baru dan melanjutkan pendidikan/sekolah. Dengan demikian perkembangan Kabupaten Sintang dapat dikatakan relatif berkembang.

Selanjutnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sintang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2: Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabuapten Sintang, Tahun 2008**

No.	Tingkat Pendidikan/Jiwa	
1.	Tidak/Belum sekolah	2.185
2.	Tidak/Belum Sekolah Dasar	53.944
3.	Tamat Sekolah Dasar	149.399
4.	Tamat SMP	86.726
5.	Tamat SMA	36.249
6.	Tamat SMK	4.404
7.	Tamat Diploma I-III	4068
8.	Tamat Perguruan Tinggi	1.978
	Jumlah	338.593

Sumber Data: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2008.

Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) sebanyak 243.058 jiwa atau sekitar 64 persen, sedangkan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) ke atas sekitar 36 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut maka latar belakang pendidikan penduduk Kabupaten Sintang relatif rendah. Melihat kondisi latar belakang penduduk yang relatif rendah menurut pemerintah setempat mengupayakan akan diadakannya program-program pendidikan untuk anak putus sekolah agar mereka mau melanjutkan sekolah lagi. Berikut ini digambarkan jumlah angkatan kerja seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4.3: Keadaan Penduduk Menurut Angkatan Kerja atau Bukan Angkatan Kerja, Tahun 2008**

No.	Angkatan Kerja/Bukan	Jumlah
1.	Penduduk yang Berkerja	221.179
2.	Penduduk yang Mencari Pekerjaan	1.686
	Penduduk Bukan Mencari Pekerjaan	181.717

Sumber Data: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang bekerja cukup besar yakni 221.179 jiwa. Dijelaskan disini bahwa penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas:

- a. Jumlah penduduk bersekolah 70.637 jiwa
- b. Jumlah penduduk mengurus rumah tangga 108.800 jiwa
- c. Lain-lain 2.280 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja menunjukkan jumlah penduduk untuk mengurus rumah tangga lebih dominan. Jumlah penduduk untuk mengurus rumah tangga sebgaaian besar adalah ibu-ibu rumah tangga. Namun demikian menurut hasil observasi bahwa para ibu-ibu rumah tangga tidak sepenuhnya bukan angkatan kerja formal, tetapi mereka sebagian besar sebagai petani karet atau

petani sawah dan berkebun. Dengan demikian hasil sebagai petani dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan rumah tangga.

Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut mata pencaharian penduduk sebagian besar berada di sektor pertanian, perburuhan/pegawai dan perikanan sebanyak 145.020 jiwa. Di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 15.847 jiwa. Sektor industri pengolahan sebanyak 3.273 jiwa. Sektor listrik, gas dan air sebanyak 2.307 jiwa dan sektor bangunan sebanyak 4.943 jiwa. (Kabupaten Sintang dalam Angka, Tahun 2008).

Sumber daya alam kabupaten Sintang terdapat di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Sumber daya tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber daya alam yang tersedia ada yang sudah dieksplorasi atau masih dalam keadaan utuh belum dieksplorasi berdasarkan sumber daya alam tersebut mempunyai cadangan devisa daerah. Adapun sumber daya alam tersebut yakni:

- a. Sumber daya alam pada sektor perkebunan rakyat dengan berbagai komoditi; Karet, kelapa sawit, lada, padi dan lain-lain dengan luas keseluruhan 27.232 hektar.
- b. Sumber daya alam pada bahan tambang dengan sebagian besar dikelola penambangan tradisional.
- c. Sumber daya alam hutan, sekitar 3.229.900 Km persegi. Peruntukkan luas wilayah sumber daya hutan menurut Pemerintah daerah setempat sesuai tata ruang wilayah yakni: (1). Hutan Pusat PPA sebesar 3,72 persen (2). Hutan Lindung sebesar 31,38



persen (3). Hutan produksi terbatas 12,99 persen (4) Hutan produksi biasa 0,14 persen dan (5). Hutan produksi yang dapat dikompensasikan sebesar 30,69 persen.

## 2. Pendidikan

**Tabel 4.4: Keadaan Sekolah, Siswa dan Guru di kabupaten Sintang, Tahun 2008**

No.	Keadaan sekolah/siswa/guru	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
1.	Sekolah	413 sekolah	82	31
2.	Siswa	58.823	16.158	9.272
3.	Guru	3.262	1.119	786

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008/2009.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bila sekolah antar jenjang dibandingkan, maka makin tinggi tingkat jenjang sekolah, maka semakin kecil jumlah sekolah tersebut, hal ini dapat di lihat dari perbandingan sekolah tingkat dasar (SD dan MI) lebih besar yakni 413 sekolah dibandingkan dengan sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) hanya 82 dan 31 sekolah. Demikian pula jumlah siswa sekolah dasar lebih besar dibandingkan jenjang sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK). Jika dilihat perbedaan jumlah sekolah dan jumlah siswa antar jenjang tersebut sangat besar, seharusnya perbandingan jumlah sekolah dan siswa tidak terlalu besar, hal ini mengindikasikan bahwa dari siswa yang tidak tertampung tersebut bisa jadi putus sekolah atau melanjutkan sekolah ke kabupaten/kota lain. Alasan lain dapat di lihat dari jumlah siswa Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SMP dan MTs) yakni 16.158 siswa dibandingkan jumlah siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) 9.272 siswa, dari data tersebut terdapat perbandingan yang mencolok,

seharusnya jumlah siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MI) dengan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) hampir sama.

Lebih jelasnya keberadaan berkurangnya jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA dan MA), dapat menjadi tolok ukur adanya angka putus sekolah pada kedua jenjang tersebut. Lebih jelasnya dapat di lihat dari kondisi siswa sekolah berdasarkan jenjang pendidikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.5: Angka Kelulusan dan Putus Sekolah pada Siswa di Kabupaten Sintang, Tahun 2007**

No.	Jenjang Sekolah	Tingkat Kelulusan/Persen	Putus Sekolah
1.	SD/Sederajad	93,31	1,32
2.	SMP/Sederajad	88,19	2,32
3.	SMA/Sederajad	89,61	0,64

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008/2009.

Berdasarkan angka kelulusan siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA dan MA). Sedangkan angka putus sekolah terlihat pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) lebih tinggi dari Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA). Jika di lihat dari angka putus sekolah pada jenjang pendidikan, maka angka putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) lebih tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP dan MTs) di Kabupaten Sintang cukup tinggi. Menurut

hasil informasi dari salah seorang pegawai Diknas Pendidikan Kabupaten Sintang bahwa jumlah perbandingan jenjang Pendidikan Tingkat Dasar (SD dan MI) tidak sebanding dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) mengakibatkan ada anak yang putus sekolah. Hal ini disebabkan bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) berada di ibukota Kecamatan, sehingga anak usia sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena jauh dan tidak ada tempat menginap.

Berikut ini dikemukakan angka putus sekolah seluruh siswa di Kabupaten Sintang menurut jenjang pendidikan. Tahun 2008.

**Tabel 4.6: Angka Putus Sekolah pada Siswa di Kabupaten Sintang. Tahun 2008**

No.	Jenjang Sekolah	Putus Sekolah 2006/2007/ siswa	Putus Sekolah 2007/2008/ siswa
1.	SD/Sederajat	751	735
2.	SMP/Sederajat	385	221
3.	SMA/Sederajat	52	57

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008/2009.

Berdasarkan tabel di atas jumlah siswa yang putus untuk Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) menempati jumlah terbanyak, hal ini disebabkan untuk siswa Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) lebih banyak jumlahnya dari jumlah siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA). Dari data tersebut dapat dikatakan untuk Kabupaten Sintang angka putus sekolah jumlah cukup besar. Besarnya jumlah angka putus sekolah merupakan tanggung

jawab pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar menanggulangi masyarakat yang tidak sekolah.

## **B. Gambaran Umum Kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**

### **Kabupaten Sintang.**

#### **1. Sejarah Berdirinya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

Sejarah berdirinya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berasal dari cikal bakal pendidikan luar sekolah terutama ditujukan pada masyarakat putus sekolah. Kegiatan pendidikan luar sekolah mulai tahun 1976 hingga 2000 pengelolaannya di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2000 pengelolaannya langsung di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan diberi nama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Lebih jelasnya sejarah penamaannya seperti berikut ini:

- a. Pusat Latihan dan Pendidikan Masyarakat (PLPM) pada tahun 1976 –1986
- b. Sanggar Kegiatan Belajar Sintang (Depdikbud) pada tahun 1986 – 2000
- c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang (Pemkab Sintang) pada tahun 2000 hingga sekarang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 383 tahun 2000 Bab III pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di bidang Kegiatan belajar. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dituangkan pada pasal 5 yakni Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan Pembuatan Percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah raga berdasarkan kebijaksanaan Dinas Pendidikan.

## **2. Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

Penanaman Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang mempunyai visi dan misi sebagai pedoman pelaksanaan setiap program kegiatan. Adapun visi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah *terciptanya masyarakat gemar belajar, berakhlak mulia, mandiri dan berkualitas yang memiliki daya saing*. Sedangkan misi berisi:

- a. Mewujudkan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu penyelenggaraan program DIKLUSPORA yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- b. Mengembangkan program percontohan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Mengembangkan perogram percontohan pendidikan keaksaraan
- d. Mengembangkan program percontohan pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C SMA.
- e. Mengembangkan program percontohan kecakapan hidup/life skill/magang dan kursus-kursus.
- f. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai pengendali mutu program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) di Kabupaten Sintang.

- g. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai sumber informasi pelayanan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) yang terpercaya.

Berdasarkan visi dan misi, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan program-program yang menjadi agenda. Fungsi secara garis besar dapat diartikan sebagai “sumbangan sejumlah tindakan terhadap tujuan yang lebih besar” (*one of a group of related actions contributing to a larger action*). Secara lebih sederhana lagi istilah-istilah tersebut dapat diartikan sebagai guna, faedah, atau manfaat. Fungsi sepeda motor adalah mempermudah perjalanan dan mempercepat waktu tempuh menuju suatu tempat. Jarak 15 km bila ditempuh dengan berjalan kaki mungkin membutuhkan waktu 2 jam dan dengan kaki yang letih karena perjalanannya. Dengan bantuan sepeda motor, maka jarak tersebut dapat ditempuh dengan sepeda motor (yang berfungsi dengan baik) dalam waktu 20 menit.

Sumbangan yang diberikan terhadap tujuan yang lebih besar lagi tergantung sejauh mana sesuatu dapat berfungsi. Sepeda motor yang berfungsi dengan baik akan dapat mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Namun demikian, apabila kendaraan tersebut tidak berfungsi dengan baik maka pemanfaatannya tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sepeda motor yang sering macet akan memperpanjang waktu tempuh. Bahkan tidak berfungsinya suatu kendaraan dengan baik justru dapat menghambat pencapaian tujuan. Bila kendaraan tersebut remnya blong, maka justru akan membahayakan pengendaranya sehingga

pengendaranya celaka. Tujuan yang semula ke rumah atasannya misalnya, justru ia sampai di rumah sakit karena mengalami kecelakaan.

Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang telah ditentukan dalam peraturan menteri. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/O/1989, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah diberi beberapa fungsi yang harus dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan melalui kerjasama yang baik antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam organisasi tersebut yang secara garis besar terdiri dari unsur Kepala, tenaga Tata Usaha, dan tenaga fungsional Pamong Belajar. Dalam pasal 3, semua fungsi telah disebutkan secara jelas. Pelaksanaan tugas adalah difungsikan untuk:

- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
- c. Melakukan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dalam rangka meningkatkan segala aspek kehidupan;
- d. Memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan keterampilan fungsional;
- e. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- f. Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Melakukan urusan tata usaha dan rumahtangga sanggar.

Berikut ini dikemukakan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabuapten Sintang seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.7: Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1989 dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 383 tahun 2000 Bab III pasal 6.**

No.	Keputusan Menteri No. 036/O/1989	Keputusan Bupati No. 383 tahun 2000
1.	Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.	Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
2.	Memotivasi dan membina warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan	Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
3.	Memberikan pelayanan informasi kepada warga belajar yang memerlukan keterampilan fungsional	Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga; pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
4.	Menyediakan sarana dan fasilitas belajar	Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal
5.	Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.	Pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
6.	Melakukan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dalam rangka meningkatkan segala aspek kehidupan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
7.	Melakukan urusan tata usaha dan rumahtangga sanggar	Pelaksanaan urusan tata usaha.



Dari tabel di atas terlihat dua perbedaan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, terdapat pada keberadaan fungsi “Penyusunan Rencana dan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang” menurut Surat Keputusan Bupati yang sebenarnya lebih cenderung sebagai tugas dari pada sebagai fungsi karena fungsi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas-tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Kedua, pengadaan sarana dan fasilitas belajar lebih ditekankan pada muatan lokal. Pada saat ini ada beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pendidikan Anak Usia Diri (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus, Pelatihan dan lain-lain.

Pemerintah daerah juga memberikan beberapa fungsi yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati. Menurut Keputusan Bupati Sintang Nomor 383 tahun 2000 Bab III pasal 6, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana dan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang;
- b. Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- c. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- d. Pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang masing-masing dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk setiap angkatannya. Untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK), dilaksanakan dari anak usia sekitar 3 Tahun sampai 6 Tahun. Program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan untuk warga masyarakat baik usia sekolah ataupun tidak dan bertujuan agar warga belajar bisa membaca, menulis dan berhitung secara fungsional. Apabila telah berhasil menyelesaikan program Keaksaraan Fungsional (KF) warga belajar bisa melanjutkan ke Kejar Paket A Setara SD.

Program kesetaraan yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam pendidikan nonformal adalah Paket A, Paket B, dan Paket C. Berikut ini dijelaskan ketiga program paket tersebut:

a. Paket A

Kelompok Belajar Paket A merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal setara dengan Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI). Program Paket A bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Keaksaraan Fungsional (KF), dan siswa putus Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) agar memiliki

kemampuan yang setara dengan lulusan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh pendidikan formal.

b. Paket B

Kelompok Belajar Paket B juga merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal pada pendidikan kesetaraan. Program Paket B bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Paket A, lulusan Sekolah Tingkat Dasar (SD dan MI) yang tidak tertampung pada pendidikan formal serta siswa putus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) agar memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dilaksanakan oleh pendidikan formal. Adapun Kejar Paket B setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) hanya berbeda jalur pendidikannya saja. Sedangkan kegiatan seperti pelatihan dan kursus diadakan bisa menunggu persetujuan proposal atau bisa juga dengan program mandiri.

c. Paket C

Kelompok Belajar Paket C merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal pada pendidikan kesetaraan. Program Paket C bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Paket B, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs) yang tidak tertampung pada pendidikan formal serta siswa putus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) agar memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan Sekolah Menengah Umum yang dilaksanakan oleh pendidikan formal.

Penyelenggaraan program Paket C merupakan salah satu program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menindaklanjuti pendidikan dasar 9 tahun. Melalui program Paket C warga belajar dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu berinteraksi positif dengan lingkungannya, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau perguruan tinggi. Tujuan penyelenggaraan program Paket C dapat tercapai apabila dalam sistem sosial masyarakat telah terjadi pemahaman positif terhadap keberadaan program, manfaat program, dan perhatian serius pemerintah terhadap pemerataan jangkauan pendidikan nonformal.

### 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

#### a. Kondisi Ketenagaan

Jumlah tenaga keseluruhan yakni tenaga PNS: 7 orang dan tenaga honorer 1 orang. Pegawai tamatan SMP 1 orang, tamatan SMA 2 orang, S1 3 orang dan S 2 1 orang. Selanjutnya jumlah PNS berdasarkan jabatan pada tabel berikut:

**Tabel 4.8: Kondisi Hierarchy Jabatan Pengelola. Tahun 2008**

Jumlah	No.	Jabatan
1	1	Kepala SKB
3	2	Pamong Belajar
3	3	Staf TU
7		Jumlah

Sumber: DUK Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun 2009

Jabatan pengelola SKB hanya terdiri dari kepala SKB satu orang, didampingi staf TU 3 orang yang membantu di bidang administratif, sedangkan tenaga pamong belajar terdiri dari 3 orang. Tugas pamong sebagai tenaga pengajar di SKB. Terbatasnya jumlah tenaga pamong hanya 3 orang, maka untuk memenuhi tenaga pengajar sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan, maka pihak pengelola merekrut tenaga pengajar dari guru-guru SMA/Sederajat di kabupaten Sintang. Selain tenaga pengajar, untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar, berikut ini dikemukakan kondisi sarana/bangunan SKB seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4. 9. Keadaan Bangunan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sintang, Tahun 2008**

Sumber: DUK Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun 2009

No.	Jenis Bangunan	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Kondisi
1	Kantor	132	Cukup baik
2	Mess SKB	258	Cukup baik
3	Asrama Pendidikan	220	Cukup baik
4	Ruang Belajar	144	Cukup baik
5.	Perpustakaan	45	Cukup baik
6.	Aula	36	Cukup baik
	Jumlah	835	

Sumber: DUK Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun 2009

Berdasarkan tabel tentang keadaan bangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang memiliki sarana yang sangat representatif untuk melaksanakan program setiap kegiatan. Semua ruangan yang ada dalam kondisi cukup baik. Hal ini dapat memberikan kenyamanan kepada warga belajar dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain sarana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang juga

memiliki beberapa fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan tersebut seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.10: Keadaan Fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang, Tahun 2008**

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Meja kursi	40 set	Baik
2	Perangkat computer	12 unit	Baik
3	Infocus	1 buah	Baik
4	Wireless	2 buah	Baik
5	Laptop	2 buah	Baik
6	Sound system	2 set	Rusak
7	Mesin rumput	1 buah	
8	Lapangan olahraga:		
9	Sepakbola	1 buah	
10	Bulu tangkis	1 buah	
11	Tennis meja	2 buah	
12	Bola volley	2 buah	
	Jumlah	835	

Sumber: DUK Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas maka jenis-jenis fasilitas SKB dapat dikatakan cukup lengkap untuk melaksanakan kegiatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler seperti peralatan olahraga. Demikian pula ketersediaan komputer cukup memadai untuk pelatihan dasar siswa dalam mengoperasikan komputer. Demikian pula ketersediaan perpustakaan.

#### 4. Kondisi Perpustakaan

- a. Luas bangunan : 45 m<sup>2</sup>
- b. Kondisi : Cukup baik

- c. Koleksi buku yang ada : 573 judul
- d. Pengelola : 1 orang

### **5. Kurikulum Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga (Dirjen Dikluspora) bekerjasama dengan Pusat Kurikulum Badan Latihan dan Pengembangan (Balitbang) menyusun Kurikulum tahun 2004 untuk pendidikan non formal memuat standar kompetensi tiap mata pelajaran. Status pendidikan kesetaraan agar setara dengan jalur pendidikan formal setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA). Penyusunan standar kompetensi ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik pendidikan kesetaraan yang sangat khas dan beragam. Peserta didik berasal dari masyarakat pedesaan, pertanian, pesisir, pondok pesantren, masyarakat kota kurang mampu, termasuk anak jalanan, pekerja anak, anak bermasalah hukum dan orang dewasa yang belum mendapatkan pendidikan dasar dan menengah dari berbagai kalangan.

Sesuai dengan keragaman dan karakteristik tersebut maka standar kompetensi ini menekankan aspek kecakapan hidup yang diharapkan dapat dicapai melalui:

1. Mata pelajaran berorientasi pembinaan akhlak mulia yaitu Pendidikan Agama
2. Mata pelajaran berorientasi akademik yaitu Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, bahasa Indonesia, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
3. Mata pelajaran berorientasi pada kecakapan hidup yaitu pendidikan jasmani, Kerumahtangaan, ekonomi Lokal, Keterampilan Bermatapencapaian atau muatan lokal dan etika bekerja.

Mata Pelajaran Secara umum mata pelajaran yang ada pada program paket C sama dengan mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada pendidikan formal, hanya saja kurikulum dan materi pembelajaran lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Berikut ini mata pelajaran yang terdapat pada paket C, yakni:

- a. Mata pelajaran Agama
- b. Mata pelajaran Sosiologi
- c. Mata pelajaran Geografi
- d. Pendidikan Kewarga Negara
- e. Mata pelajaran Bahasa Indonesia
- f. Mata pelajaran Ekonomi
- g. Mata pelajaran Matematika
- h. Bahasa Inggris
- i. Penjaskes
- j. Muatan lokal

Kegiatan keterampilan komputer tingkat dasar

- a. Teori pengenalan komputer software dan hardware
- b. Kegiatan praktek, kegiatan menggunakan komputer secara umum
- c. Membuat data dan menyimpan data
- d. Drawing dan membuat table

#### **6. Struktur Organisasi Pelaksana Program**

Hubungan antara sumber daya (*resources*) dengan birokrasi dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya sumber daya



manusia yang berkualitas dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota masyarakat sebagai pengguna jasa layanan aparat pemerintahan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan ikut mensukseskan suatu program kebijakan. Secara organisasional, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah mengalami perubahan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1989, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Dirjen Diklusepora) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya. Setelah era otonomi daerah, sekarang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang bukan lagi Unit Pelaksana teknis (UPT) pusat yang dikendalikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal. Pemerintah daerah memegang kunci penting penentu keberadaan dan perkembangannya, karena menjadi wewenang pemerintah daerah..

Perubahan tersebut berdampak pada redaksional uraian tugas. Menurut Keputusan Menteri di atas, tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah, pemuda, dan olahraga baik untuk sumber belajar maupun warga masyarakat dan memiliki beberapa fungsi yang seragam di seluruh Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, maka rincian tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang telah menjadi kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskannya. Akibatnya, tugas dan fungsi

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berpotensi untuk tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang diatur menurut Keputusan Bupati No. 383 tahun 2000. Berdasarkan Bab III Pasal 5, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang yang sekarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten ini mempunyai tugas melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijaksanaan Dinas Pendidikan. Sebagai program percontohan pemerintah daerah menyediakan sarana dan fasilitas kegiatan belajar berupa gedung sekolah dan gedung asrama. Beberapa program yang menjadi agenda pemerintah terutama untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun untuk anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) dilakukan melalui pendidikan kesetaraan program Paket B dan Paket C. Dilihat dari susunan organisasinya, terlihat bahwa perubahan dasar hukum yang mendasari telah mengubah susunan organisasinya. Susunan organisasi menurut peraturan yang lama terdiri dari tiga unsur dan menurut peraturan yang baru terdiri dari empat unsur. Keempat unsur tersebut terpisah-pisah secara jelas. Namun demikian, perubahan tersebut tidak sampai pada esensinya. Unsur kepala tidak mengalami perubahan. Unsur Urusan Tata Usaha hanya diubah namanya menjadi Unit Tata Usaha. Unit Pelatihan dan Unit Pengembangan pada dasarnya dilaksanakan oleh satu unsur yang sama, yaitu kelompok tenaga fungsional.

Semua pegawai yang terkait di Unit pelaksana teknis bertindak sebagai Pamong Belajar yang mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dapat dilihat pada skema berikut ini:



Keterangan Bagam 2 : Struktur Organisasi SKB Kab. Sintang

Struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan garis komando dan *job dekriftion* yakni masing-masing bagian atau personel mempunyai wewenang tugas sesuai dengan hirarki jabatan dan tugasnya sesuai dengan program Paket C. Masing-masing bagian mempunyai sesuai struktur orgainsasi. Struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang terdiri dari struktur tenaga fungsioanal 3 orang dan tenaga administrasi 3 orang.

## 7. Kurikulum Pembelajaran Program Paket C

Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Kurlum tahun 2004. Direktorat mengeluarkan buku pedoman Program Paket C Setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yang berdasarkan kurikulum tahun 2004. Buku

pedoman berisi standar Kompetensi tiap-tiap mata pelajaran. Penyusunan standar kompetensi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik/warga belajar pendidikan kesetaraan yang sangat khas dan beragam. Materi pembelajaran harus berdasarkan rambu-rambu yang sesuai dengan standar kompetensi. Rambu-rambu tersebut terdiri dari:

1. Kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran. Tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan kecakapan hidup. Metode-metode yang digunakan antara lain metode kooperatif, metode penemuan, metode interaktif, eksploratif, tugas mandiri, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor mata pelajaran Sosiologi Bapak Maman Kusmana mengatakan bahwa metode yang digunakan bisa bervariasi dalam ruangan atau di luar kelas. Warga belajar diberi tugas mata pelajaran Sosiologi, warga belajar disuruh mencari data dan mengeksplorasi permasalahan-permasalahan masyarakat di sekitarnya. Dari data tersebut warga belajar mencari solusi bagaimana cara penyelesaian masalahnya.
2. Kegiatan penilaian. Penilaian dalam setiap mata pelajaran diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Penilaian dapat menggunakan model model berdasarkan perbuatan atau penilaian otentik dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: catatan kegiatan, catatan anekdot, skala sikap, tugas individu, diskusi, dan portofolio. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tenaga pengajar/tutor belum sepenuhnya menggunakan kegiatan evaluasi pembelajaran menggunakan penilaian skala sikap, penilaian portofolio dan catatan anekdot.

Tenaga pengajar/tutor hanya memberikan soal-soal atau tugas dari materi yang telah diajarkan.

Berdasarkan rambu-rambu pembelajaran yang telah diuraikan di atas terdapat tiga bidang kegiatan yakni kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran, kegiatan penilaian, dan praktek belajar. Berikut ini dikemukakan standar kompetensi seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.11: Standar Kompetensi Tiap Mata Pelajaran Program Paket C**

No.	Standar kompetensi	Indikator Standar kompetensi
1.	Kecakapan Hidup	1. Kecakapan personal 2. Kecakapan Sosial 3. Kecakapan Intelektual 4. Kecakapan Vokasional
2.	Standar Kompetensi Lulusan	1. Melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain 2. Menghargai perbedaan pendapat 3. Mampu melaksanakan hak dan kewajiban 4. Berpikir logis, kritis dan kreatif dan produktif 5. Memiliki kecakapan hidup atau keterampilan khusus yang dapat menopang hidupnya.
3.	Kompetensi Dasar	1. Muatan materi bahan ajar sesuai mata pelajaran 2. Indikator-indikator sebagai jabaran materi yang diajarkan
4.	Standar Kompetensi Pengembangan	1. Materi pokok 2. Penyesuaian materi dengan potensi lokal 3. Penyesuaian materi dengan siswa 4. Pengalaman belajar

Sumber: Kurikulum 2004 Dir. Pendidikan Luar Sekolah, tahun 2004

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa standar kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lokasi dan warga belajar SKB Kabupaten Sintang menggunakan kurikulum tahun 2004 berisi standar kompetensi tiap-tiap mata pelajaran dan dituangkan dalam modul pembelajaran. Tiap standar kompetensi disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan warga belajar.

Pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan mempunyai keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan formal di usia sekolah pada saat ini belum bisa sampai hingga ke pelosok. Pada saat ini pelayanan pendidikan kepada kelompok masyarakat terbatas pada pendidikan kesetaraan yang berasal dari modifikasi pendidikan formal. Dari hasil modifikasi memang kenyataan terdapat banyak kekurangan, Misalnya jadwal pertemuan yang dipersingkat, mata pelajaran yang disederhanakan serta jumlah kelas yang terbatas pula. Namun demikian kesempatan untuk mendapatkan ijazah bisa dimiliki. Ijazah tersebut berlaku umum bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Bagi warga belajar yang belum bisa tertampung harus menunggu program berikutnya atau mencari alternative sekolah yang lain.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama orang tua harus memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar menamatkan sekolah. Pendidikan Kesetaraan sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berusaha mencari alternatif solusi mengadakan kelas setiap tahun ajaran, sehingga anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan sekolah. Mereka diharapkan bisa mendapatkan pelayanan pendidikan

sebagai amanat pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan visi dan misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sintang agar bisa memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya dan menampung anak-anak yang putus sekolah. Pendidikan non formal ini dapat dijadikan percontohan bagi program mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda dan olah raga. Melalui pendidikan non formal dapat dijadikan motivasi bagi siswa yang putus sekolah dan warga masyarakat lain agar mau meneruskan sekolah hingga tamat.

UNIVERSITAS TERBUKA

### **C. Pelaksanaan Program Sanggar Kelompok Belajar (SKB) Program Paket C Kabupaten Sintang**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan non formal sebagai salah satu pendidikan yang dapat membantu masyarakat yang oleh sesuatu sebab tidak dapat menuntaskan pada jenjang pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan non formal sebagai salah satu langkah upaya pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Melalui Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 pada pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan non formal berfungsi untuk mendukung fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan non formal khususnya program pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan legalitas dari lembaga pendidikan, maka program paket yang ada di masyarakat dapat disetarakan dengan pendidikan formal.

Selama ini pelayanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan mempunyai keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan formal di usia sekolah, untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada kelompok masyarakat tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yang meliputi program Paket A, Paket B, dan Paket C. Ciri ketiga program paket tersebut lebih fleksibel dan berorientasi pada kecakapan hidup dan standar kompetensi yang diberikan lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.



Proses kegiatan program pada pelaksanaannya seperti yang dikatakan Jones (1991), yakni menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, ruang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Kajian ini menganalisis implementasi program pelaksanaan kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang khususnya program paket C Tahun ajaran 2004/2005, dan Tahun ajaran 2006/2007. Program yang dianalisis adalah tentang aktivitas aparatur pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang apakah dapat terlaksana dengan baik dan analisis program kegiatan berupa (1) Persiapan kegiatan program, (2) Kegiatan pembelajaran, dan (3) Luaran program.

#### **1. Persiapan Program SKB Sintang**

Kegiatan program Paket C SKB Sintang dapat terlaksana dengan lancar apabila didukung oleh persiapan yang terarah dan rinci. Pada tahapan persiapan terdapat beberapa komponen yang harus dipersiapkan oleh pelaksana program. Berikut ini beberapa tahapan persiapan yang dilakukan oleh pihak pelaksana program, diantaranya adalah:

##### **a. Pembuatan Surat Keputusan Kepanitiaan Program Kegiatan**

Tahapan pertama yang dipersiapkan adalah Kepanitiaan pelaksana program sesuai dengan struktur jabatan masing-masing keadaan pegawai di SKB. Setiap kegiatan program dituangkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sintang, Surat Keputusan tersebut diberikan kepada tenaga fungsional dan tata usaha, tenaga honorer dan pegawai lain yang terlibat dalam program kegiatan. Masing-masing program dibuat uraian tugas sesuai dengan jenis kegiatan, sehingga para tenaga yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan dalam uraian tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola SKB Sintang mengatakan bahwa adanya struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan menjadi dasar bagi kami dalam menjalankan tugas sesuai tugas masing-masing agar terarah dan tepat sasaran. Tenaga fungsional bertugas memfasilitasi segala kegiatan program-program yang ada, dan tenaga administrasi bertugas mempersiapkan keperluan administrasi kegiatan program. Sebagai tenaga fungsional selain memfasilitasi kegiatan program pada saat tertentu berfungsi menjadi tenaga pengajar/tutor sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Menurut kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa struktur organisasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan untuk masyarakat dan jumlah dana yang tersedia, kebutuhan prioritas yang dimaksud adalah jenis program paket dan anggaran biaya yang disetujui. Berdasarkan hasil observasi lapangan, struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari satu orang kepala dibantu oleh tenaga fungsional dan urusan Tata Usaha.

#### **b. Perekrutan Tenaga Pengajar/Tutor dan Warga Belajar/Siswa**

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan

suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup (a) Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, (b) Kemauan pimpinan yang mendukung kegiatan program. Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah dari staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Salah satu indikator bermutu atau tidaknya program ditentukan oleh tingkat keahlian para pendukung program Kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berupa program Paket A, Paket B dan Paket C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan dan kegiatan keterampilan dapat dikatakan cukup banyak. Kegiatan ini akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari pemerintah dan segenap anggota masyarakat baik berupa dana, tenaga maupun pikiran. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah masalah tenaga pengajar/tutor yang belum memenuhi persyaratan. Pemerintah belum bisa mengadakan semua tenaga pengajar/tutor sesuai dengan keahlian bidang ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar/tutor, maka pihak pengelola merekrut dari masyarakat yang memiliki persyaratan yang diperlukan.

Tenaga Pengajar/tutor yang tersedia sekaligus sebagai tenaga fungsional di SKB hanya terdiri dari 3 orang, berdasarkan jumlah tersebut tidak memenuhi

kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan. Untuk memenuhi tenaga pengajar maka pihak pengelola merekrut tenaga pengajar sesuai dengan latar belakang keahlian dari tiap-tiap mata pelajaran. Berdasarkan keterangan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang ibu Dra. Misiani tenaga pengajar/tutor dari berbagai program belum semuanya tersedia. Pihak pengelola merekrut tenaga pengajar/tutor dari berbagai anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan. Demikian pula tenaga fungsional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang selain bertugas menjadi pelaksana kegiatan juga bertugas sebagai tenaga pengajar/tutor. Tenaga pengajar/tutor yang tersedia di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang khusus kegiatan program Paket C ada 4 tenaga pengajar/tutor ditambah dari tenaga honorer berjumlah 6 orang, dan jumlah keseluruhan sebanyak 10 orang tenaga pengajar/tutor.

Saat ini pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang belum mempunyai tenaga pengajar/tutor khusus yang ditugaskan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Tenaga pengajar/tutor yang direkrut sebagian besar dari guru-guru yang ada di Kabupaten Sintang. Permasalahan perekrutan tenaga pengajar/tutor yang direkrut kadang-kadang tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki tiap mata pelajaran. Kekurangan tenaga pengajar/tutor tidak sesuai bidang keahlian mengakibatkan muatan materi yang disampaikan kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat mengatakan bahwa sistem perekrutan tenaga pengajar/tutor sebagian besar belum sesuai dengan bidang keahlian, tidak jarang tenaga pengajar/tutor menyampaikan materi asal-asalan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mata pelajaran yang diajarkan oleh tutor pihak luar diantaranya mata pelajaran Bahasa Inggris dengan tenaga pengajar Bapak Samiri, sedangkan mata pelajaran Matematika dan Ekonomi diasuh oleh Bapak Darsono. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tutor mengatakan bahwa perekrutan tenaga tutor disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing tutor, dan para tutor bersedia membantu program belajar demi memajukan sumber daya manusia di kabupaten Sintang.

Selain perekrutan tenaga pengajar yang perlu dipersiapkan adalah para warga belajar/murid/siswa yang berada didaerah terutama didaerah terpencil. Sebagaimana diketahui bahwa di daerah terpencil tidak terdapat SMA, maka besar kemungkinan banyak siswa putus sekolah. Perekrutan siswa melalui perwakilan-perwakilan dari SKB Kabupaten Sintang dengan membawa surat yang ditujukan kepada kepala desa. Melalui kepala desa diumumkan kepada warga setempat. Antusias masyarakat untuk mengikuti program paket C sangat besar, namun terbatasnya jumlah siswa yang diterima biasanya tiap desa dibatasi jatah sebanyak 3 atau 4 orang. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang petugas berdasarkan hasil wawancara beberapa waktu lalu, karena jatah tiap desa terbatas, maka tidak semua siswa putus sekolah bisa tertampung, hingga harus menunggu program selanjutnya.

### **c. Persiapan Kurikulum Pembelajaran dan Jadwal Kegiatan**

Persiapan kesediaan kurikulum berasal dari Kurikulum yang berlaku berasal dari Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah

dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Kurikulum tahun 2004. Direktorat mengeluarkan buku pedoman Program Paket C Setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yang berdasarkan kurikulum tahun 2004. Buku pedoman berisi standar Kompetensi tiap-tiap mata pelajaran. Penyusunan standar kompetensi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik/warga belajar pendidikan kesetaraan yang sangat khas dan beragam. Menurut buku Kurikulum tahun 2004 Standar kompetensi tiap-tiap mata pelajaran program Paket C muatan isi materi pelajaran lebih disederhanakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kurikulum lebih disederhanakan dan cirinya lebih fleksibel, seperti tempat belajar, waktu belajar dan sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem multi exit dan multi entri. Selain itu pelaksanaan dan waktu evaluasi belajar dilaksanakan sesuai dengan periodisasi dari warga belajar yang akan melaksanakan ujian. Hasil ujian tersebut tidak menggunakan lulus dan tidak lulus, tetapi menggunakan standar lulus atau belum lulus.

Setiap kegiatan program memuat standar kompetensi mengacu pada kurikulum tahun 2004 berisi standar kompetensi tiap mata pelajaran. Selanjutnya berdasarkan standar kompetensi bidang pengembangan kurikulum bertugas membuat kegiatan pembelajaran dan uraian tugas pengajar/tutor. Tim Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang menyusun kalender pendidikan berdasarkan Tahun ajaran yang disesuaikan dengan program kejar paket C. Program pengembangan kurikulum menyangkut persiapan jadwal, persiapan warga belajar, materi pelajaran, alat dan buku-buku ajar, tenaga pengajar dan metode pengajaran. Warga belajar mendapatkan

mempunyai pengetahuan yang luas sesuai potensi daerah yang mereka miliki. Mereka generasi muda mempunyai peluang untuk mengembangkan daerahnya agar lebih berkembang dan maju.

**a. Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran Paket C disesuaikan dengan dana yang disetujui anggaran berjalan dari angkatan 2004/2005, 2005/2006 hingga tahun 2006/2007 selama 3 tahun dengan jumlah warga belajar sebanyak 40 orang warga belajar. Untuk Tahun ajaran 2005/2006 program lanjutan diperuntukkan kepada warga belajar kelas 2 (dua) yang berasal dari warga belajar tahun lalu, dan program tersebut tidak menerima warga belajar kelas 1 (satu) yang baru. Alasan tidak hanya melanjutkan kelas 1 (satu) ke kelas 2 (dua) karena dana yang disetujui hanya untuk satu kelas. Dan untuk tahun ajaran 2006/2007 program lanjutan diperuntukkan warga belajar kelas 3 (tiga) yang berasal dari warga belajar tahun lalu hingga mengikuti Ujian Akhir Nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Ibu Misiani mengatakan bahwa setiap tahun ajaran tidak menerima warga belajar baru sebagaimana kegiatan pendidikan di sekolah pendidikan formal, hal ini disebabkan dana yang tersedia hanya berlaku untuk satu kelas, jadi pelaksanaan kegiatan program paket C pada tahun berikutnya meneruskan kelas terdahulu hingga mengikuti ujian akhir. Apabila warga belajar angkatan pertama sudah lulus, maka untuk tahun ajaran berikutnya menerima warga belajar kelas satu, demikian seterusnya.

Ketersediaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk program kegiatan Paket C tahun ajaran 2006/2007 sebanyak dua kelas yakni warga belajar

kelas satu naik ke kelas dua, warga belajar kelas dua naik ke kelas tiga. Program Paket C menerima warga belajar sebanyak 40 orang setara dengan kelas 1 SMA selama satu tahun ajaran, kemudian tahun berikutnya melalui dana berkelanjutan warga belajar tersebut naik kelas dua, hingga tahun 2006/2007 naik kelas 3. Pada tahun 2007 warga belajar angkatan 2004/2005 telah mengikuti program Ujian Akhir Nasional. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang hanya ada satu program studi yakni Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). program studi ini lebih sesuai dengan kondisi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dan keadaan warga belajar.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan selama dua semester tiap tahun ajaran. Untuk tahun ajaran 2006/2007 dilakukan pada bulan Juli 2006 hingga Juni 2007 selama 12 bulan. Pelaksanaan tahun berikutnya disesuaikan persetujuan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima pengelola. Lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut ini:

**Tabel. 4.12: Keadaan Siswa Program Paket C tahun 2006/2007**

No.	Program Paket C	Semester	Jumlah warga belajar	Bulan
1.	Kelas 2	3 dan 4	40	Juli 2006 sampai Juni 2007
2.	Kelas 3	5 dan 6	40	Juli 2006 sampai Juni 2007

Sumber: UPT SKB Kab. Sintang Tahun 2008

Berdasarkan data dari tabel di atas kegiatan program Paket C hanya untuk dua kelas yakni kelas dua dan kelas tiga. Pelaksanaan kelas satu belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Ibu Misiani mengatakan



bahwa kegiatan kelas satu untuk sementara waktu ditunda, karena dana yang disetujui hanya cukup untuk kelas dua dan kelas tiga. Penempatan kelas dua dan kelas tiga dengan pertimbangan bahwa adanya kenaikan tingkat kelas, warga belajar kelas tiga kalau sudah lulus maka pengelola mempersiapkan program berikutnya dimulai dari kelas satu demikian seterusnya. Menurut hasil observasi di lapangan dapat dijelaskan bahwa penerimaan warga belajar untuk program selanjutnya harus membuat proposal kegiatan terlebih dahulu ditujukan ke pemerintah daerah dan Ditektorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (Dir. Dikluspora). Apabila dana disetujui maka program tersebut dapat dilaksanakan.

Sebagaimana sesuai ciri pendidikan kesetaraan program Paket C bersifat fleksibel, maka kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang ini menyesuaikan kemampuan dan kondisi warga belajar sebagai peserta didik. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak pengelola adalah kemudahan tempat kegiatan agar tidak memberatkan warga belajar. Kegiatan program angkatan pertama lokasi kegiatan ditempatkan di kampus/kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang di ibu kota Kabupaten dianggap cukup strategis karena berada di antara kecamatan-kecamatan yang ada. bagi warga belajar yang berasal dari pelosok yang cukup jauh, untuk memberikan kemudahan kepada warga belajar maka pihak pengelola menyediakan asrama tempat tinggal warga belajar.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang memiliki fasilitas asrama terdiri atas 14 kamar. Dari kamar tersebut dapat menampung sekitar 56 orang warga belajar. Fasilitas lainnya terdapat ruang belajar dan ruang aula tempat berkumpul. Pada umumnya warga belajar yang tinggal di asrama berasal dari kecamatan yang sangat jauh dan terpencil dengan jarak tempuh ke Sintang memakan waktu antara 5 hingga 8 jam perjalanan, baik dengan menggunakan jalur darat maupun jalur sungai.

Warga belajar diijinkan menempati asrama selama masa pendidikan tanpa dipungut biaya, namun untuk biaya keperluan hidup dibebankan kepada warga belajar. Fasilitas asrama sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga belajar yang berasal dari desa yang terpencil mengatakan bahwa program paket C memberikan kemudahan bagi warga belajar untuk tempat tinggal, sedangkan pada sekolah formal tingkat SMA tidak menyediakan asrama, bagi kami yang tidak mempunyai biaya maka kami tidak bisa meneruskan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan program kelompok belajar Paket C tidak selamanya dilaksanakan, tetapi bisa dilaksanakan di beberapa kecamatan tertentu yang dapat menampung warga belajar dari desa sekitar yang terdekat. Penempatan tempat belajar ini agar lebih memudahkan bagi warga belajar untuk mengikuti kegiatan belajar tanpa mengalami hambatan. Khusus untuk kegiatan program Paket C tahun ajaran 2008/2009, berdasarkan hasil observasi di lapangan dilaksanakan di Desa Solam Raya

dan Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian. Penempatan ini dapat menjangkau warga belajar yang berada di daerah pelosok.

#### **b. Jadwal Mata Pelajaran**

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran program Kesetaraan Paket C yang bersifat fleksibel baik tempat belajar, waktu belajar dengan menggunakan multi entri maka jadwal kegiatan juga disesuaikan dengan kondisi lokasi dan warga belajar program Paket C. Demikian pula program studi untuk paket C adalah program studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program tersebut berdasarkan kondisi lingkungan sanggar, karena hanya mampu melaksanakan program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pelaksanaan Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk saat ini belum bisa dilaksanakan karena faktor pendukung seperti ketersediaan laboratorium, ketersediaan tenaga pengajar dan kemampuan warga belajar belum bisa diterapkan. Apalagi setiap program hanya bisa melaksanakan satu kelas. Perolehan data sekunder dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang menyatakan bahwa semua mata pelajaran dari kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga) berjumlah 14 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan pengembangan potensi lokal setempat warga belajar digiring agar memahami kondisi atau keadaan lingkungan alam. Salah satu contoh mata pelajaran geografi, memuat kondisi riil geografis Kabupaten Sintang, seperti mengenai perkebunan sawit dan karet. Siswa dibawa langsung ke lokasi perkebunan karena mereka bertempat tinggal di lingkungan tersebut sehingga warga belajar lebih mengenal lingkungan sekitarnya. Berikut digambarkan jadwal kegiatan belajar dan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 13: Jadwal Kegiatan Belajar Paket C Setara SMA Kelas 1 Semester 1 SKB Kabupaten Sintang Tahun 2004/2005**

No.	hari	Jam	Materi Plajaan	Tenaga Pengajar
1	Senen	12.00-12.30	Bahasa Inggris	Samiri
		12.30-13.00	Bahasa Inggris	
		13.00-13.30	PPKN	Dedi Oktariadi, Se
		13.30-13.15	Istirahat	
		13.15-13.45	PPKN	
		13.45-14.15	Antropologi	Dra Misiani
		14.15-14.45	Antropologi	
		14.45-15.00	Istirahat	
		15.00-15.30	Keterampilan	Dra Misiani
		15.30-16.00	Keterampilan	
		16.00-16.30	Mulok	Samiri
16.30-17.00	Mulok			
2.	Selasa	12.00-12.30	Matematika	Darsono
		12.30-13.00	Matematika	
		13.00-13.30	Sejarah	Dedi Oktariadi, SE
		13.30-13.15	Istirahat	
		13.15-13.45	Sejarah	
		13.45-14.15	Akutansi	Darsono
		14.15-14.45	Akutansi	
		14.45-15.00	Istirahat	
		15.00-15.30	Kewirausahaan	Dra Musriah
		15.30-16.00	Kewirausahaan	
		16.00-16.30	Agama	Darsono
16.30-17.00	Agama			
3.	Rabu	12.30-13.00	Ekonomi	Samiri
		13.00-13.30	Ekonomi	
		13.30-14.00	Bahasa Indonesia	Dra Musriah
		14.00-14.15	Istirahat	
		14.15-14.45	Bahasa Indonesia	
		14.45-15.15	Sosiologi	Maman Kusuma SP
		15.15-15.45	Sosiologi	
		15.45-16.00	Istirahat	
		16.00-16.30	Geografi	Maman Kusuma SP
		16.30-17.00	Geografi	

Sumber: UPT SKB Kab. Sintang Tahun 2008

warga belajar yang mengikuti kegiatan program Paket C sebagian ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja. Partisipasi dan motivasi belajar warga belajar dalam mengikuti kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tidak semua dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Tingkat keaktifan warga belajar selama semester ganjil kelas satu Semester satu angkatan 2004/2007 dilaporkan hanya mencapai 33 persen. Berikut ini dikemukakan rekapitulasi angka kehadiran dapat di lihat berikut ini:

**Tabel 4.14: Porsentase Jumlah Ketidakhadiran warga belajar Program Paket C Tahun 2006/2007**

Kelas	Hari belajar	Rata-rata Jumlah masuk	Rata-rata tidak masuk	Porsentase/ %
1.	144 hari	96 hari	48 hari	34
2.	144 hari	103 hari	41 hari	29

Sumber: UPT SKB Kab. Sintang Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan ketidakhadiran warga belajar termasuk cukup besar. Data ketidakhadiran warga belajar merupakan suatu masalah yang cukup serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tutor bernama Bapak Maman Kusmana mengatakan bahwa berbagai alasan ketidakhadiran warga belajar. Penyebab ketidakhadiran warga belajar dikarenakan warga belajar tersebut sudah bekerja, atau lokasi tempat tinggal jauh dari tempat belajar. Namun ada sebagian lagi yang memang motivasi untuk belajar kurang. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami dari pihak pengelola selayaknya masalah ini dijadikan bahan

evaluasi setiap program kegiatan dan mencari solusi agar kegiatan tersebut tidak sia-sia.

### **3. Luaran/Lulusan program**

Suatu program kebijakan akan berhasil jika didukung dan digerakkan oleh para pengelola secara terorganisir sesuai dengan tujuan program. Sebaliknya suatu kebijakan tidak didukung oleh segenap pengelola maka kebijakan tersebut akan mengalami hambatan atau tidak akan berhasil dengan baik. Tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan.

Peran pengelola khususnya kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dan tenaga pengajar/tutor sangat menentukan berhasil atau tidaknya peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Komitmen dan kesungguhan untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi warga belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai konsekuensi logis untuk bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang telah diamanahkan kepada pihak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Tinggi atau rendahnya mutu pendidikan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir kelulusan melainkan lebih ditentukan oleh proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan kegiatan Program paket C yang paling utama ditandai dengan kelulusan warga belajar, namun tujuan keberhasilan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang juga ditentukan tuntasnya pelaksanaan semua kegiatan program.

Mengenai kelulusan warga belajar pada saat Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang telah melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN) warga belajar angkatan 2004/2005 yang dilaksanakan tahun ajaran 2006/2007 sebanyak 40 orang warga belajar tetapi yang sudah lulus sebanyak 30 orang warga belajar dan yang belum lulus sebanyak 10 orang warga belajar. Sistem kelulusan program Paket C tidak ada istilah lulus atau tidak lulus, melainkan lulus atau belum lulus. Bagi peserta yang belum lulus bisa mengulang pada Ujian Akhir Nasional (UAN) berikutnya hingga dinyatakan lulus. Permasalahan peserta yang belum lulus seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa peserta yang belum lulus disebabkan oleh warga belajar, karena tidak aktif dalam setiap pertemuan belajar mengajar. Pihak pengelola masih memberi kesempatan kepada mereka yang belum lulus apabila ingin mengulang Ujian Akhir Nasional (UAN) sepanjang masih tercatat menjadi warga belajar kegiatan program paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.

Menanggapi masalah warga belajar yang belum menuntaskan Ujian Akhir Nasional (UAN) disebabkan oleh kurang aktifnya warga belajar dalam setiap pertemuan belajar mengajar seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah tanggungjawab kami untuk memberikan motivasi kepada warga belajar agar aktif mengikuti belajar untuk periode berikutnya. Kami menyadari kekurangan pelaksanaan kegiatan program paket C karena kurangnya pembinaan. Sebagaimana diketahui bahwa peserta program mempunyai

latar belakang permasalahan yang berbeda. Adapun permasalahan tersebut diantaranya:

- (a). Warga belajar yang kurang berminat untuk melanjutkan sekolah, warga belajar tersebut sudah terbiasa tidak sekolah, karena sudah terbiasa santai tidak berpikir.
- (b). Kurangnya perhatian dari orang tua untuk memberikan motivasi kepada anaknya agar meneruskan sekolah
- (c). Diantara warga belajar yang mengikuti program sudah bekerja, sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya setiap saat.
- (d). Warga belajar yang sudah mengenal uang, warga belajar tersebut sudah mempunyai penghasilan sendiri dan tidak mau repot-repot sekolah lagi, karena tanpa sekolah yang tinggi bisa menghasilkan uang.

Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan sebelumnya pada pelaksanaan kegiatan program Paket C oleh SKB berdasarkan hasil observasi di lapangan masih terdapat kendala diantaranya:

- (1). Struktur organisasi SKB Sintang sebagai unit pelaksana teknis pendidikan nonformal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Program-program yang terdapat di SKB Kabupaten Sintang cukup beragam namun tenaga pegawai dan tenaga khusus untuk setiap program belum memadai, sehingga petugas-petugas masih direkrut dari luar.



- (2). Masalah dukungan dana yang tidak menentu baik jumlah dan keseriusan pemerintah untuk mengalokasikan dana membuat program-program yang dibuat belum bisa dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan
- (3). Latar belakang keluarga warga belajar dalam kondisi ekonomi rendah dan kondisi geografis yang sangat jauh serta medan yang sulit membuat warga belajar kesulitan mengikuti program dengan sungguh-sungguh. Ada juga warga belajar yang kurang mempunyai motivasi yang kuat mengikuti program sehingga keaktifan belajar sangat kurang.
- (4) Kurikulum yang lebih disederhanakan, membuat warga belajar menganggap program paket C hanya untuk mendapatkan ijazah bukan untuk menambah ilmu pengetahuan, sehingga belajarnya kurang serius.
- (5). Jumlah waktu belajar enam semester setiap angkatan dan jam pertemuan yang dikurangi, sehingga muatan materi yang diberikan belum optimal.
- (6). Perekrutan untuk tenaga pengajar/tutor tidak sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian mata pelajaran yang dibutuhkan sehingga materi yang diajarkan kurang optimal.
- (7). Luaran atau hasil lulusan warga belajar masih banyak yang belum tuntas (belum lulus) sehingga program tersebut dianggap kurang berhasil.
- (8). Belum adanya hasil evaluasi dari pihak pengelola baik hasil evaluasi program maupun hasil evaluasi kelulusan warga belajar.

#### **D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

Kesungguhan para pelaksana dalam hal ini para aparat/pengelola kegiatan program dan didukung oleh pimpinan dalam hal ini bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten akan berdampak pada keberhasilan program. Pelaksanaan program tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik kondisi aparat, lingkungan serta situasi di lapangan. Faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan terhadap keberhasilan atau kegagalan sebagaimana yang dikemukakan oleh George C. Edwadr III (1980) terdiri dari faktor sumber daya, faktor birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap. Berdasarkan pendapat tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bahasan berikut dipilih faktor-faktor yang dianggap lebih relevan, diantaranya faktor sumber daya, faktor komunikasi dan faktor disposisi/sikap.

##### **1. Faktor Sumber Daya**

Faktor sumber daya termasuk sumber daya aparat/personil pelaksana dan sumber dana amat berperan dalam keberhasilan program. Seperti para personil mempunyai keahlian yang dimiliki dan tanggungjawab mengimplementasikan kebijakan agar bisa berjalan secara efektif. Tak kalah pentingnya adalah sumber dana. Apabila dana tersedia, maka program bisa dilaksanakan, sebaliknya apabila dana kurang memadai bisa jadi program tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

**a. Ketersediaan dana berupa Dana Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Untuk Paket C**

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum pada pasal 28c ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, pendidikan kesetaraan menawarkan peluang bagi semua pihak untuk menikmati hasil pendidikan bermutu. Warga belajar mempunyai pilihan untuk menentukan keterampilan yang sesuai bagi potensi, minat, kebutuhan dan peningkatan keahlian. Pendidikan kesetaraan memberikan peluang bagi warga belajar untuk memperoleh pengakuan terhadap pembelajaran yang telah ditempuhnya melalui jalur pendidikan yang dapat memberikan kecakapan hidup.

Program Paket C adalah program pendidikan menengah jalur pendidikan nonformal setara Sekolah Menengah Atas bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah Program Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah Sekolah Menengah Atas. Usia prioritas Paket C 3 tahun di atas usia sekolah yakni 19 - 21 tahun atau 3 tahun di atas

usia rata-rata pelajar Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (SMA/MA), yaitu antara 16 - 18 tahun. Secara umum paket C adalah usia diatas 19 tahun.

Salah satu faktor pendukung kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang adalah adanya Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang berasal dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat melalui Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional. Program Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) diberikan kepada program kesetaraan Paket C. Adapun tujuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah:

1. Melanjutkan pelayanan pembelajaran kepada warga belajar paket C secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan mutu program dan hasil Program Paket C
3. Meningkatkan ketuntasan pembelajaran warga belajar dalam mengikuti program Paket C sampai dapat mengikuti Ujian Akhir Nasional pendidikan kesetaraan.

Sumber Dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) berasal dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan lembaga penerima dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah lembaga/orsosmas berbadan hukum tetap yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran Paket A atau Paket B yang dibuktikan dengan adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sesuai persyaratan. Hasil yang diharapkan

pemberian bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan menengah melalui jalur nonformal program Paket C secara berkelanjutan hingga menghasilkan lulusan. Melalui pendidikan kesetaraan program Paket C diharapkan masyarakat yang belum menamatkan pendidikan jenjang setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi warga negara yang terkendala memasuki pendidikan formal atau *dop-out* pada pendidikan formal. Melalui pendidikan kesetaraan program paket C masyarakat dapat mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana yang tidak diperolehnya pada pendidikan formal. Hasil lulusan dapat dikatakan setara dengan lulusan pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Tercapainya peningkatan angka partisipasi program Paket C sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan lulusan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Terselenggaranya kegiatan program Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berasal dari Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah. Untuk mendapatkan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) melalui mekanisme sesuai persyaratan yang berlaku. Mekanisme perolehan dana dimulai melalui pengajuan proposal berasal dari lembaga penyelenggara pendidikan di daerah/kota dengan mengajukan proposal

kepada Direktorat Pendidikan Kesetaraan dengan rekomendasi Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan tembusan Dinas Pendidikan provinsi. Anggaran yang disetujui merupakan keputusan yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sesuai persyaratan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Adapun persetujuan diberikan dengan pertimbangan seperti untuk daerah sulit, terpencil, dan daerah tertinggal.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2006/2007 adalah Kejar Paket C pada Semester 1-2 dan Kejar Paket C untuk semester 6. Pertimbangan diselenggarakannya program paket C karena masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Sintang terutama setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) dan keinginan anggota masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan yang terputus. Khusus untuk pendidikan kesetaraan program Paket C sangat diminati masyarakat Kabupaten Sintang terutama mereka yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten. Dengan adanya program Paket C memberikan peluang terutama anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan lagi.

Biaya penyelenggaraan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berasal dari dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP). Untuk tahun anggaran 2006/2007 dana dari Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) diterima sejumlah Rp 51.580.000,- (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana tersebut untuk kelompok sasaran kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2006/2007 ditujukan kepada kelompok belajar

kelompok 1, yakni untuk semester 1-2 sebanyak 54 orang, dan kelompok 2 semester 6 sebanyak 44 orang. Dana yang diterima didistribusikan berdasarkan pada komponen-komponen yang terdiri dari komponen bantuan warga belajar, transport tutor, biaya kelembagaan dan bantuan modul bahan ajar. Besarnya dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di lapangan dan setiap kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran biaya yang tersedia. Berikut ini dijelaskan peruntukan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk pembiayaan beberapa komponen sebagai berikut:

**Tabel 4. 15 Peruntukan Pembiayaan dana BOP Tahun 2008**

No.	Komponen	Jumlah Dana/orang
1.	Bantuan Peserta Didik	Rp 285.000,-
2.	Bantuan Transport Tutor	Rp 4,200.000,-
3.	Bantuan Transport Penyelenggara	Rp 3.200.000,-/Lembaga
4.	Bantuan modal bahan ajar	Rp 84.000,-

Sumber: Data Dir. Pendidikan Kesetaraan Diknas Tahun 2009

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat dijelaskan rincian biaya program dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) khususnya untuk biaya bantuan warga belajar sebanyak Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari dana tersebut sebagian diperuntukkan pengadaan alat tulis dan bahan pembelajaran sebanyak Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagian lagi diberikan kepada peserta didik/warga belajar berupa bantuan motivasi belajar sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perwarga belajar. Biaya tersebut menurut kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang Ibu Misiani, berdasarkan hasil

wawancara mengatakan: bahwa tidak semua bantuan biaya warga belajar diberikan semuanya, biaya tersebut dibagi untuk pengadaan alat dan bahan ajar dan biaya motivasi belajar warga belajar. Distribusi pembiayaan yang dikelola oleh pihak pengelola sepanjang tidak menyalahi petunjuk yang telah ditetapkan menurut buku pedoman Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP). Mekanisme pengelolaan program dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) sangat membantu kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan program berkelanjutan. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun ajaran 2004/2005, tahun ajaran 2005/2007 hingga tahun ajaran 2006/2007. Kegiatan dimulai dari kelas 1 (satu), kelas 2 (dua) hingga kelas 3 (tiga). Dari warga belajar tersebut telah menamatkan program paket C sebanyak 30 warga belajar dari 40 orang peserta. Menurut salah seorang Pamong Belajar bernama Bapak Sumadi berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang yang berasal dari dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) berlaku untuk satu kelas dan dilaksanakan untuk warga belajar angkatan 2004/2005 selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut hingga tamat. Setelah warga belajar tersebut tamat, program dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) diberikan pada angkatan berikutnya untuk tahun ajaran 2007/2008.



Sebagaimana diketahui pada umumnya peserta didik/warga belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang berasal dari kalangan kurang mampu dan pada umumnya mereka putus sekolah. Berikut ini hasil wawancara dari salah seorang orang tua warga belajar yang mendapat program dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) , demikian menurut paparanya:

“Saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak pemerintah yang telah memberikan bantuan sekolah anak saya, karena dapat meringankan biaya sekolahnya. Anak saya bisa melanjutkan sekolah setara SMA tentunya harapan saya sebagai orang tua kelak anak saya bisa mendapatkan pekerjaan”.

Kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan kegiatan program secara berkelanjutan dengan biaya dari pemerintah. Program yang dilaksanakan untuk angkatan pertama tahun 2004 sudah meluluskan sebanyak 41 orang warga belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tutor Bapak Kamidin mengatakan bahwa program paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang telah meluluskan sebanyak 41 orang warga belajar. Mereka pada umumnya warga belajar putus sekolah, dan sebagian ada yang sudah bekerja. Setelah lulus paket C diantara mereka sudah ada yang bekerja. Hal senada dijelaskan oleh salah seorang lulusan warga belajar bernama Simon Petrus mengatakan bahwa setelah lulus saya melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan sawit dan ternyata lamaran saya diterima. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan saya untuk sekolah lagi.

Saat ini peluang-peluang pekerjaan baik di pemerintah dan perusahaan swasta memberikan persyaratan pendidikan untuk tenaga lapangan minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Masyarakat yang tidak memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berarti tidak bisa melamar pekerjaan. Apalagi mereka yang sudah terlanjur putus sekolah. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan pemerintah melaksanakan kegiatan non formal melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang ternyata memberikan peluang kepada masyarakat mendapatkan pekerjaan. Terutama masyarakat di daerah pelosok memberikan peluang kepada mereka mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana yang dibutuhkan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan formal. Keberpihakan pemerintah membantu masyarakat ini akan memberikan manfaat yang besar bagi keberhasilan pembangunan di daerahnya. Apabila masyarakat tidak mandiri maka terpulang kepada pemerintah, mereka akan menjadi beban pemerintah atau bahkan bisa melakukan perbuatan kriminal.

Kegiatan program pendidikan kesetaraan Paket C angkatan pertama dimulai tahun ajaran 2004/2005 sudah menghasilkan lulusan sebanyak 30 orang. Bersamaan kelulusan angkatan pertama disusul angkatan kedua dimulai tahun ajaran 2007/2008. Jika ditinjau indikator kelulusan warga belajar Paket C maka program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dianggap berhasil. Dari angkatan yang lulus beberapa diantara mereka sebanyak 15 orang

pemikiran mereka biaya tersebut lebih baik dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selain faktor mahal nya biaya transportasi, faktor iklim pada bulan September hingga Desember terjadi musim hujan. Akibatnya terjadi banjir dan di beberapa ruas jalan yang belum beraspal terkena banjir atau mengalami kerusakan parah hingga jalan tersebut terputus tidak bisa dilalui kendaraan. Beberapa daerah tertentu biaya transportasi menjadi lebih mahal dan sulit di dapat. Akibatnya masyarakat tidak bisa melakukan perjalanan keluar dari desanya. Masyarakat berada di beberapa desa menjadi terisolir, tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya motivasi masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Keberadaan program Paket C seperti diketahui berada di Kota Sintang. Walaupun pemerintah menyediakan asrama untuk menampung masyarakat yang berasal dari daerah, tetapi program tersebut hanya bisa menampung sekitar 40 orang warga belajar sedangkan minat masyarakat sangat banyak. Dengan daya tampung yang sangat minim maka banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti program Paket C, beberapa diantara mereka harus mengantri, padahal persyaratan usia dibatasi antara 18-20 tahun. Kondisi ini mengakibatkan banyak siswa yang putus sekolah tidak bisa sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga belajar mengatakan bahwa jumlah penerimaan program Paket C dibatasi hanya sekitar 40 orang, padahal banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut.

Program Paket C merupakan alternatif pemecahan masalah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ijazah setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), jika dilihat di lapangan animo masyarakat sangat besar, namun kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan program Paket C untuk masyarakat putus sekolah masih terdapat hambatan seperti:

- (1). Lokasi kegiatan yang terlalu jauh dari lokasi lokasi di desa atau kecamatan terdekat dengan tempat tinggalnya. Harapan masyarakat agar kegiatan program Paket C dilaksanakan di kecamatan terdekat dari peserta, sehingga bisa menghemat biaya.
- (2). Kapasitas program yang sangat terbatas, tidak bisa mengakomodir semua masyarakat yang ingin mengikuti program Paket C.
- (3). Program Paket C tidak menerima peserta setiap tahun ajaran untuk warga belajar kelas satu, tetapi program tersebut hanya untuk meluluskan warga belajar angkatan sebelumnya. Jika sudah tamat baru menerima warga belajar baru, tidak seperti sekolah pendidikan formal, setiap tahun ajaran menerima siswa baru.

#### **d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sintang sebagian besar sebagai petani ladang, berkebun karet dan bekerja di beberapa perusahaan sawit. Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang telah dilakukan secara turun temurun. Biasanya hasil pertanian ladang berupa padi untuk konsumsi masyarakat selama satu tahun. Pekerjaan menoreh karet sebagai pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan mata

pencapaian tersebut pada umumnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah anak putus sekolah. Orang tua yang menyekolahkan anak berarti harus menambah pengeluarannya, akan tetapi bila anak tidak bersekolah, maka anak tersebut dapat membantu pekerjaan orang tuanya atau bahkan lepas dari beban orang tuanya karena sudah mendapatkan penghasilan sendiri. Keinginan untuk cepat mendapatkan uang merupakan penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. Bersekolah berarti menunda peluang untuk segera mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bersekolah maka anak dapat segera mendapatkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan terutama untuk keperluan diri sendiri.

Demikian pula salah satu penyebab mengapa mereka putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga. Faktor ini menyebabkan anak-anak harus membantu orang tua mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, atau membantu orang tua menoreh karet. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tutor mengatakan bahwa pada dasarnya sebagian besar anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, karena keberadaan sekolah yang jauh dari lokasi tempat tinggal mengakibatkan mereka kesulitan melanjutkan sekolah. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai salah satu alternatif agar mereka bisa melanjutkan sekolah yang terputus. Masyarakat menginginkan agar pelaksanaan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tidak hanya ditempatkan di lokasi ibu kota kecamatan tetapi bisa

dilaksanakan di kecamatan yang representatif sehingga bisa mengakomodir anak-anak yang berada di sekitar kecamatan terdekat.

Sebagaimana diketahui pada umumnya sekolah tingkat menengah berada di ibukota kabupaten. Bagi anak-anak yang menginginkan melanjutkan sekolah harus mengeluarkan biaya relatif besar seperti biaya pondokan (menginap) dan biaya keperluan sekolah lainnya. Orang tua pada umumnya tidak mampu mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk mengirimkan anak-anaknya sekolah di Sintang. Dengan demikian salah satu penyebab anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolahnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

#### **e. Faktor Kesadaran orang tua dan anak**

Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dalam bentuk kesetaraan. Tujuan pendidikan nonformal untuk memberikan peluang pada masyarakat di daerah yang terpencil bisa melanjutkan pendidikan tanpa melalui pendidikan formal.

- (1). Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga mengakibatkan sebagian masyarakat lebih mencari penghasilan daripada meneruskan sekolah. Demikian pula jumlah anggota keluarga yang relatif banyak, mengakibatkan orang tua harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa banyak diantara masyarakat mempunyai problema keterbatasan dana untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana diketahui

bahwa lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di ibu kota Kabupaten, untuk meneruskan sekolah tentunya memerlukan biaya yang lebih besar.

- (2). Faktor lingkungan alam seperti sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan serta sektor peternakan ikan, menggambarkan faktor tersebut banyak menyediakan lapangan pekerjaan masyarakat di daerahnya. Masyarakat tidak perlu harus sekolah tinggi, dengan bekerja mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan mudahnya. Jenis pekerjaan seperti ini memerlukan banyak tenaga kerja. Kadang-kadang orang tua mengharapkan anak-maknya menolong pekerjaan orang tua menggarap lahan. Lingkungan seperti ini berpengaruh terhadap anak-anak yang masih usia remaja. Seharusnya diusia mereka mereka waktunya dipergunakan untuk menemepuh pendidikan. Tidak jarang dari merka ikut-ikutan keluarga atau teman-teman lebih memilih bekerja daripada sekolah. Salah satu motivasi masyarakat lebih memilih berkerja daripada meneruskan sekolah seperti memilih bekerja di pertambangan emas. Sebagaimana diketahui kegiatan pertambangan emas liar marak di daerah Sintang. Kegiatan menambang emas lebih menjanjikan daripada harus sekolah. setiap hari masyarakat bisa mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang lumayan besar.
- (3). Kebanyakan orang tua di wilayah Kabupaten Sintang mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak. Lingkungan yang masyarakatnya berpendidikan rendah juga berpengaruh terhadap kemauan anak untuk bersekolah atau mengikuti pendidikan. Orang tua menganggap bahwa apabila menamatkan

sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, padahal kondisi sumber daya alam yang dimiliki bisa menghasilkan tanpa harus menunggu menamatkan sekolah terlebih dahulu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan kenyataannya banyak diantara masyarakat yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka mampu membeli hand phone atau sepeda motor dan barang lainnya. Mereka tidak berminat untuk sekolah karena dengan sekolah menunda mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tutor ibu Suyati mengatakan bahwa kekayaan sumber daya alam berupa hutan dan barang tambang memberikan peluang mendapatkan penghasilan. Masyarakat lebih tertarik untuk mencari uang dari pada sekolah. Alasannya untuk mendapatkan penghasilan tidak perlu sekolah tinggi, alasannya kekayaan alam yang tersedia memberikan penghidupan yang cukup baik. Oleh karenanya para remaja usia sekolah kurang tertarik untuk melanjutkan sekolah padahal mereka mampu untuk membiayai sekolahnya. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa enak karena sudah dapat menikmati uang hasil usahanya sendiri.

## **2. Faktor Komunikasi**

Salah satu berhasilnya suatu kebijakan dipengaruhi unsur komunikasi. Faktor komunikasi amat berperan bagi aparat untuk mengemukakan gagasannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan lancarnya suatu tugas. Implementator yang baik dapat dilihat dari kemampuannya membangun komunikasi dengan orang lain yang bekerjasama dengannya. Oleh karenanya informasi yang baik



akan memudahkan seseorang atau aparat menjalankan tugas dalam mencapai tujuan secara efektif.

Keberhasilan membangun komunikasi yang baik dalam hal ini pembuat kebijakan program yaitu Bupati diwakili oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai penanggungjawab program kepada pengelola program akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program. Komunikasi bertujuan untuk menghindari kesalahan informasi antara si pemberi informasi dan si penerima informasi. Metode yang paling efektif adalah komunikasi dua arah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten mengatakan bahwa untuk merealisasikan kegiatan program paket C yang telah dicanangkan pemerintah kabupaten, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada para pengelola dan pegawai/aparat yang bertugas di bidangnya. Para pengelola diundang melalui rapat dinas dengan agenda membahas persiapan dan rencana pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dibuat suatu rencana kerja yang disesuaikan dengan tupoksi pelaksanaan kegiatan program.

Komunikasi selalu dibangun pada saat akan memulai pelaksanaan hingga berakhirnya kegiatan program. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua pengelola program Ibu Dra Misiani mengatakan bahwa sepanjang pelaksanaan program kami selalu melakukan komunikasi secara vertikal yakni Dinas Pendidikan Kabupaten dan komunikasi secara horizontal yakni aparat dan para pamong/guru. Pada saat pelaksanaan tugas atau dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, jika mendesak kami mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau

insidental sesuai dengan kondisi dan permasalahan. Misalnya menyangkut kesiapan warga belajar dalam menghadapi ulangan atau ujian sekolah. Dalam rapat tersebut membahas rancangan dan sampai sejauhmana segala sesuatunya sudah dipersiapkan.

### **3. Faktor Disposisi/Sikap/Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten.**

Berhasilnya kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan program wajib belajar paket C tidak terlepas dari sikap pemerintah untuk memajukan masyarakat di bidang pendidikan. Peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sangat menentukan berhasil atau tidaknya peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat. Komitmen dan kesungguhan untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai konsekuensi logis untuk bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang telah diamanahkan oleh masyarakat.

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang mempunyai pengaruh besar dan sentral dalam pemerintahan terutama dalam membuat kebijakan, oleh karena itu seorang pemimpin dituntut mempunyai kepedulian dan keberpihakan terhadap dunia pendidikan. Masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah terutama bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka bisa mendapat peluang yang sama menempuh pendidikan sebagaimana layaknya masyarakat mampu. Oleh karenanya tanggungjawab dan kepedulian pemerintah agar dapat menciptakan program-program pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung diperoleh secara gratis.

Salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kegiatan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Salah satu pendidikan nonformal adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang yang dapat menampung dan memberikan pengetahuan serta keterampilan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Saat ini beberapa program yang menjadi agenda kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang seperti program kesetaraan paket A, paket B dan paket C, program keaksaraan, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan program keterampilan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil. Pemerintah memberikan alternatif pendidikan nonformal agar masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kabupaten Sintang mengatakan bahwa :

“Tidak semua masyarakat Kabupaten Sintang mendapatkan pelayanan pendidikan formal. Angka putus sekolah di Kabupaten Sintang termasuk cukup besar terutama lulusan SMP, pada umumnya lulusan tersebut tidak tertampung pada jenjang pendidikan SMA. Mereka yang tidak tertampung disebabkan bahwa jumlah jenjang pendidikan SMA lebih sedikit dari keberadaan sekolah SMA apalagi lokasinya berada di ibu kota Kabupaten. Akibatnya masyarakat yang berada di daerah pelosok-pelosok mendapatkan kesulitan meneruskan sekolah pemerintah memberikan alternatif kesempatan kepada masyarakat yang kurang beruntung melalui pendidikan nonformal dengan berbagai jenis kegiatan. Harapannya mereka bisa mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan di SKB Kabupaten Sintang”.

Salah satu faktor utama terbentuknya pendidikan nonformal berasal dari dukungan dana dari pemerintah. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai unit pelaksanaan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai

Sarana dan fasilitas yang memenuhi persyaratan dapat memberikan kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Pelaksana kegiatan dalam hal ini implementator dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Demikian pula masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pemerintah dapat memanfaatkan jasa layanan tersebut. Bagaimanapun juga dengan tersedianya sumber daya yang lengkap, masyarakat akan menghargai keseriusan pemerintah untuk membangun daerahnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang, pemerintah menyediakan beberapa fasilitas dan sarana untuk warga belajar dari berbagai program kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dengan luas lokasi 21.314 meter persegi, terdapat sarana dan fasilitas yang tersedia yakni:

- (1) Ketersediaan sarana terdiri dari gedung kantor, gedung asrama sebanyak 14 kamar, perpustakaan dan, ruang belajar, ruang taman bacaan dan rumah penjaga kantor. Kondisi sarana yang tersedia saat ini masih keadaan baik, dan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar warga belajar.
- (2) Ketersediaan fasilitas terdiri dari fasilitas komputer, buku modul, buku perpustakaan, alat-alat olah raga, alat-alat pertukangan dan alat kecantikan. Ketersediaan fasilitas keterampilan setiap tahun anggaran biaya di perbanyak sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Fasilitas ini diharapkan dapat



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Program pendidikan non formal kelompok belajar paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang merupakan program berkelanjutan pada tahun ajaran 2006/2007 dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan kurikulum Tahun 2004. Pelaksanaan program paket C terdiri dari dua kelas yakni kelas I semester 1-2 dan kelas III semester 5-6. Program pengajaran disesuaikan dengan karakteristik warga belajar, seperti kurikulum yang disederhanakan, tempat belajar di SKB Kabupaten Sintang dan waktu belajar dilaksanakan tiga kali dalam seminggu selama 6 (enam) semester setiap angkatan. Pada Tahun ajaran 2006/2007 telah melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN) warga belajar angkatan 2004/2005 sebanyak 40 orang warga belajar. Dari 40 orang warga belajar yang sudah lulus 30 orang warga belajar dan yang belum lulus 10 orang warga belajar.
2. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan program paket C setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SKB Kabupaten Sintang adalah :
  - a. Adanya dukungan dana dari Pemerintah berupa Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket C dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional.
  - b. Adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.

- c. Sumber dana Bantuan Sosial (block grant) BPPNFI Banjar Baru Kalimantan Selatan (SKB Kabupaten Sintang termasuk Regional VI).

Faktor Penghambat adalah :

- a. Faktor geografi Kabupaten Sintang yang cukup jauh dan medan yang berat didaerah pelosok membuat masyarakat tidak bisa meneruskan Pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- b. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah membuat mereka tidak mampu melanjutkan sekolah ke ibukota Kabupaten.
- c. Faktor kesadaran orang tua juga mempengaruhi kesadaran anak untuk melanjutkan sekolah.

## **B. Saran**

1. Perlu dipertimbangkan penambahan kurikulum dengan muatan local yang disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat sehingga lulusan paket C SKB Kabupaten Sintang memiliki nilai tambah dan kekhasan.
2. Bantuan dana perlu ditingkatkan sehingga dapat meringankan beban biaya bagi Warga Belajar yang secara ekonomis dan geografis masih tertinggal. Dengan demikian kesadaran para orang tua dan Warga Belajar diharapkan akan meningkat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Azazi, 2007. Indeks *Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat* diambil tanggal 28 Februari 2010 dari situs World Wide Web <http://www.pontianakpost.com>
- Badjuri, A. & Yuwono, T. (2003). *Kebijakan Publik, Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Biro Pusat Statistik (BPS)/, (2008). *Indeks pendidikan di Kalimantan Barat* tanggal 28 Februari 2010 dari situs World Wide Web <http://www.bps.go.id>
- Covey, S.R. (2006). *Delapan Kebiasaan Manusia yang Paling Efektif*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Diktentis. (1992). *Modul 27 Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKB*. Jakarta: Depdikbud.
- Direktorat Dikmas. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2002) *Program Paket C*. Direktorat Dikmas. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (2001) *Pengelolaan Paket C*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Dror, Y. (1971). *Strategic for Administrative Reform Development and Change*. Netherlands: The Haque
- Drucker, P.F. (1983) *Manajemen: Tugas, Tanggung Jawab, Praktek*. Jakarta: Gramedia.
- Dye, R. Thomas. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs Inc: New Jersey: Prentice Hall.
- Echols, J.M. & Sholly, H. (1989) *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, S. (1990). *Jurnal Kebijakan Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Hornby. (1988). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. British: Oxford University Press.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Keban, Y.T. (2003). *Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta. Makalah tidak diterbitkan.

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 06/U/SKB/1999 nomor 180 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.* Jakarta: Diktentis
- Keputusan Bupati Sintang No.383 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajar.* Sintang: Pemkab.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036 / O / 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.* Jakarta: Depdikbud.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 055/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pemuda dan Olahrag.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Kurniawan, Huki, 2008. *Analisis Kebijakan Publik.*, tanggal 23 Februari 2010 dari situs World Wide Web <http://hykurniawan.wordpress.com>.
- Moeleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mouly, G. J. (1973). *Psychology for Effective Teaching* New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif. edisi ketiga.* Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep-Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik. Transformasi Pikiran George Edwads.* Yogyakarta: Lukan Offset.
- Terry, G. R. & Rue, I. W. (1991) *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);* beserta penjelasannya. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Webster's Third New International Dictionary of English Language Unabridged with Seven Language Dictionary Volume II (1981)* Philipine: Meriam Webster Inc.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pengelola SKB, Tenaga Pengajar/Tutor, Warga Belajar dan Anggota Masyarakat

Daftar Pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

#### I. Identitas Informan:

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Jabatan : .....
6. Lama Bekerja : .....
7. Alamat : .....

#### II. Daftar Pertanyaan

##### A. Pelaksanaan Kegiatan di SKB Kabupaten Sintang tahun ajaran 2006/2007.

1. Persiapan Program
  - a. Surat Keputusan
  - b. Perekrutan Tenaga Pengajar/Tutor dan warga belajar/siswa
  - c. Persiapan Kurikulum dan jadwal kegiatan
2. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
  - a. Kurikulum yang berlaku
  - b. Kegiatan pembelajaran
  - c. Pelaksanaan dan Jadwal Pelajaran
  - d. Kehadiran warga belajar
  - e. Perekrutan tenaga pengajar/tutor
3. Luaran/kelulusan warga belajar

##### B. Faktor-faktor yang mempengaruhi

1. Faktor sumber daya
2. Faktor Komunikasi
3. Faktor Disposisi/Sikap

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **A. Keadaan Geografis dan Demografis Kabupaten Sintang**

1. Lokasi dan Luas Wilayah Kabupaten Sintang
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang
3. Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Sintang
4. Kondisi Pendidikan Masyarakat

### **B. Kondisi Umum Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang**

1. Kurikulum dan Modul
2. Fasilitas dan sarana
3. Keadaan pegawai dan tenaga pengajar
4. Keadaan siswa

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR INFORMAN

### 1. Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang

1. Misiani : Kepala SKB Kabupaten Sintang
2. MamanKusuma : Pamong Belajar SKB Kabupaten Sintang
3. Sumadi : Pamong Belajar SKB Kabupaten Sintang
4. Ipin Ernawati : Staf SKB Kabupaten Sintang

### 2. Tutor/Tenaga Pengajar

1. Kamidin
2. Suyati
3. Darsono
4. Samiri

### 3. Warga belajar

1. Tursini
2. Simon Petrus
3. Susana Sumi

UNIVERSITAS TERBUKA

- b. Mengembangkan program percontohan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Mengembangkan perogram percontohan pendidikan keaksaraan
  - d. Mengembangkan program percontohan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C.
  - e. Mengembangkan program percontohan kecakapan hidup/life skill/magang dan kursus-kursus.
  - f. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai pengendali mutu program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) di Kabupaten Sintang.
  - g. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang sebagai sumber informasi pelayanan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) yang terpercaya.
4. Apa saja program yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang?

Jawab:

Program yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus, Pelatihan dan lain-lain.
  - b. Program kesetaraan pendidikan nonformal yakni Paket A, Paket B, dan Paket C.
5. Terdiri apa saja struktur organisasinya?

Jawab:

Struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang terdiri dari struktur tenaga fungsioanal 3 orang dan tenaga administrasi 3 orang. Tenaga fungsional bertugas memfasilitasi segala kegiatan program-program yang ada, dan tenaga administrasi bertugas mempersiapkan keperluan adminstrasi kegiatan program.

6. Terdiri apa saja tugas-tugas yang diberikan kepada staf di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang?

Jawab:

Sebagai pelaksana teknis struktur Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang bertugas memfasilitasi dan menjalankan kegiatan program belajar pendidikan nonformal, pada saat pelaksanaannya beberapa tenaga pengajar bisa direkrut dari kalangan guru-guru sesuai dengan mata pelajaran yang diperlukan, sedangkan tenaga fungsional bertindak sebagai fasilitator sekaligus bisa sebagai tenaga pengajar/tutor.

7. Apakah semua program bisa dilaksanakan?

Jawab:

Program-program kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan untuk masyarakat dan jumlah dana yang tersedia, kebutuhan prioritas yang dimaksud adalah jenis program paket dan anggaran biaya yang disetujui.

8. Apa standar Kurikulum yang digunakan dan mengacu pada apa?

Jawab:

Kurikulum yang berlaku berasal dari Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan mengeluarkan buku pedoman Program Paket C Setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan MA) yang berdasarkan kurikulum tahun 2004.

9. Bagaimana bentuk penyusunan standar kurikulumnya?

Jawab:

Standar kurikulum berdasarkan buku pedoman yang berisi standar Kompetensi tiap-tiap mata pelajaran. Penyusunan standar kompetensi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik/warga belajar pendidikan kesetaraan yang sangat khas dan beragam. Menurut buku Kurikulum tahun 2004 Standar kompetensi tiap-tiap mata pelajaran program Paket C muatan isi materi pelajaran lebih disederhanakan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kurikulum lebih disederhanakan dan cirinya lebih fleksibel, seperti tempat belajar, waktu belajar dan sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem *multi exit* dan *multi entri*.

10. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan program Paket C?

Jawab:

Program pengembangan kurikulum menyangkut persiapan jadwal, persiapan warga belajar, materi pelajaran, alat dan buku-buku ajar, tenaga pengajar dan metode pembelajaran. Warga belajar mendapatkan materi pelajaran sesuai



dengan program paket yang dilaksanakan pada periode kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengelola.

11. Seperti apa sajakah bentuk standar kompetensi?

Jawab:

Bentuk standar kompetensi terdiri dari Kecakapan Hidup, Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Pengembangan.

12. Bagaimana bentuk pelaksanaan evaluasi belajar?

Jawab:

Pelaksanaan evaluasi belajar dilaksanakan sesuai dengan pemberisasi dari warga belajar. Hasil ujian tersebut tidak menggunakan lulus dan tidak lulus, tetapi menggunakan standar lulus atau belum lulus.

13. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan program belajar paket C?

Jawab:

Berdasarkan standar kompetensi maka bidang pengembangan kurikulum bertugas membuat kegiatan pembelajaran dan uraian tugas pamong belajar, kemudian Tim SKB menyusun kalender pendidikan berdasarkan Tahun ajaran yang disesuaikan dengan program kejar paket C. Program pengembangan kurikulum menyangkut persiapan jadwal, persiapan warga belajar, materi pelajaran, alat dan buku-buku ajar, tenaga pengajar dan metode pembelajaran. Warga belajar mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan program paket yang dilaksanakan pada periode kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengelola. Setiap standar kompetensi tiap-tiap mata pelajaran dan dituangkan dalam modul pembelajaran.

14. Apa saja rambu-rambu materi ajar?

Jawab:

Rambu-rambu tersebut terdiri dari:

- a. Kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran. Tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan kecakapan hidup
- b. Kegiatan penilaian. Penilaian dalam setiap mata pelajaran diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar.

15. Apa saja aspek-aspek komponen belajar mengajar?

Jawab:

Aspek-aspek komponen pembelajaran terdiri jadwal mata pelajaran, lokasi dan waktu belajar, tenaga pengajar/tutor (sifatnya sebagai fasilitator) dan ketersediaan dana dan kegiatan pembelajaran

16. Apa saja pelaksanaan kegiatan paket C yang diteliti?

Jawab:

Kegiatan pembelajaran Paket C disesuaikan dengan dana yang disetujui anggaran berjalan angkatan tahun ajaran 2004/2005 dilaksanakan untuk kelas 1 (satu) sebanyak 40 orang warga belajar. Tahun ajaran 2005/2006 program Paket C diperuntukkan warga belajar kelas 2 (dua) sebanyak 40 orang warga belajar. Dan tahun ajaran 2006/2007 program lanjutan diperuntukkan kepada warga belajar kelas 1 (satu) semester 1-2 dan kelas 3 (tiga) semester 5-6 yang berasal dari warga belajar tahun lalu hingga mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN). Setiap tahun ajaran tidak menerima warga belajar baru sebagaimana kegiatan pendidikan di sekolah pendidikan formal, hal ini disebabkan dana yang tersedia hanya berlaku untuk dua kelas, kegiatan program paket C pada tahun berikutnya meneruskan kelas terdahulu hingga mengikuti ujian akhir.

17. Program studi apa yang dilaksanakan untuk tahun tersebut?

Jawab:

Program studi yang dilaksanakan yakni Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). program studi ini lebih sesuai dengan kondisi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang dan keadaan warga belajar.

18. Berapa jumlah warga belajar tiap paket C?

Jawab:

Pada bulan Juli 2006 sampai Juni 2007 untuk kelas 1 (satu) semester 1-2 berjumlah 40 warga belajar, dan Juli 2006 sampai Juni 2007 untuk kelas 3 (tiga) semester 5-6 berjumlah 40 warga belajar

19. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka menampung wajib belajar yang berasal dari lokasi yang jauh?

Jawab:

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang memiliki fasilitas asrama terdiri atas 14 kamar. Dari kamar tersebut dapat menampung sekitar 56 orang warga belajar.

20. Bagaimana motivasi warga belajar dalam mengikuti aktivitas sekolah?

Jawab:

Partisipasi dan motivasi belajar warga belajar dalam mengikuti kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang tidak semua dapat mengikuti kegiatan karena sebagian besar mereka sudah bekerja sehingga sulit mengatur waktu belajar mereka. Untuk tahun ajaran 2006/2007 rata-rata ketidakhadiran sekitar 34 persen.

21. Bagaimana perekrutan tenaga pengajar/tutor?

Jawab:

Tenaga pengajar/tutor dari berbagai program belum semuanya tersedia. Pihak pengelola merekrut tenaga pengajar/tutor dari berbagai anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

22. Bagaimana hasil kelulusan warga belajar?

Jawab:

Warga belajar angkatan 2004/2005 yang dilaksanakan tahun ajaran 2006/2007 sebanyak 40 orang warga belajar tetapi yang sudah lulus sebanyak 30 orang warga belajar dan yang belum lulus sebanyak 10 orang warga belajar. Sistem kelulusan program Paket C tidak ada istilah lulus atau tidak lulus, melainkan lulus atau belum lulus. Bagi peserta yang belum lulus bisa mengulang hingga lulus.

23. Apa saja faktor pendukung terselenggaranya kegiatan SKB Paket C?

Jawab:

Salah satu faktor pendukung adalah tersedianya dana berasal Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

24. Berapa dana yang diterima dari BOP?

Jawab:

Untuk tahun anggaran 2006/2007 dana BOP diterima sejumlah Rp 51.580.000,- untuk tahun anggaran 2006/2007 ditujukan kepada kelompok belajar kelompok 1, yakni untuk semester 1-2 sebanyak 40 orang warga belajar, dan kelompok 2 semester 5-6 sebanyak 40 orang warga belajar.

2. Mata pelajaran apa yang diajar?

Jawab:

Saya mengajar mata pelajaran Sosiologi dan Geografi.

3. Menurut Bapak SKB Kabupaten Sintang di bawah naungan instransi apa?

Jawab:

SKB Kabupaten Sintang di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan diberi nama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang.

4. Menurut Bapak sejak kapan SKB Kab. Sintang didirikan?

Jawab:

Setahu saya didirikan pada tahun 2000, dan kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

5. Menurut Bapak, apa saja program yang dilaksanakan SKB Kabupaten Sintang?

Jawab:

Program yang dilaksanakan terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus, program kesetaraan pendidikan nonformal yakni Paket A, Paket B, dan Paket C.

6. Terdiri apa saja struktur organisasinya?

Jawab:

Struktur organisasi terdiri dari struktur tenaga fungsioanal 3 orang dan tenaga administrasi 3 orang.

7. Apakah semua program bisa dilaksanakan?

Jawab:

Tidak semua program bisa terlaksana, sesuai kondisi dana dan fasilitas yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang seperti pelaksanaan program kesetaraan paket C disesuaikan program IPS

8. Standar Kurikulum yang digunakan standar apa?

Jawab:

Kurikulum yang digunakan sesuai yang berlaku dan berdasarkan kurikulum tahun 2004.

9. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan program Paket C?

Jawab:

Program pengembangan kurikulum menyangkut persiapan jadwal, persiapan warga belajar, materi pelajaran, alat dan buku-buku ajar, tenaga pengajar dan metode pengajaran.

10. Seperti apa sajakah bentuk standar kompetensi?

Jawab:

Bentuk standar kompetensi terdiri dari Kecakapan Hidup, Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Pengembangan.

11. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan program belajar paket C?

Jawab:

Tahun ajaran yang disesuaikan dengan program kejar paket C. terdiri dari persiapan jadwal, persiapan warga belajar, materi pelajaran, alat dan buku-buku ajar, tenaga pengajar dan metode pengajaran.

12. Terdiri dari apa saja aspek-aspek komponen belajar mengajar?

Jawab:

Aspek-aspek komponen pembelajaran terdiri jadwal mata pelajaran, lokasi dan waktu belajar, tenaga pengajar/tutor (sifatnya sebagai fasilitator) dan ketersediaan dana dan kegiatan pembelajaran

13. Kapan saja pelaksanaan kegiatan paket C?

Jawab:

Kegiatan pembelajaran Paket C dilaksanakan dari angkatan 2004/2005, 2005/2006 hingga tahun 2006/2007 selama 3 tahun.

14. Program studi apa yang dilaksanakan oleh program Paket C?

Jawab:

Program studi yang dilaksanakan yakni Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

15. Dimana dilaksanakan kegiatan belajar mengajar?

Jawab:

Kegiatan dilaksanakan di SKB Kabupaten Sintang.

16. Bagaimana menampung siswa yang jauh dari SKB Sintang?

Jawab:

Pihak pemerintah menyediakan asrama bagi peserta wajib belajar yang jauh dari pedalaman.

**C. Wawancara dengan Bapak Sumadi, sebagai pamong Belajar SKB Kabupaten Sintang**

1. Apa status bapak di SKB Kab. Sintang?

Jawab:

Saya sebagai staf sekaligus sebagai tenaga pamong belajar.

2. Mata Pelajaran apa yang baik pegang?

Jawab:

Saya mengajar mata pelajaran keterampilan dan Bahasa Indonesia

3. Bagaimana motivasi warga belajar dalam mengikuti aktivitas sekolah?

Jawab:

Tidak semua wajib belajar bisa mengikuti pelajaran karena ada yang sudah bekerja atau lokasi tempat tinggal yang jauh.

4. Apakah warga belajar bisa mengikuti materi yang diberikan?

Jawab:

Hampir semua warga belajar bisa mengikuti materi yang diberikan karena materi yang ada lebih disederhanakan sesuai dengan kondisi lokasi belajar dan kondisi warga belajar.

5. Apakah tenaga pengajar/tutor sudah sesuai dengan latar belakang keahlian mereka?

Jawab:

Tenaga pengajar/tutor dari berbagai program belum semuanya tersedia. Pihak pengelola merekrut tenaga pengajar/tutor dari berbagai anggota masyarakat namun tidak semua sesuai dengan keahliannya.

6. Bagaimana hasil kelulusan warga belajar?

Jawab:

Untuk tahun ajaran 2006/2007 peserta wajib belajar mengikuti UAN sebanyak 40 orang warga belajar. Peserta sudah lulus sebanyak 30 orang, yang belum lulus sebanyak 10 orang.

Terdiri apa saja faktor pendukung terselenggaranya kegiatan SKB Paket C?

Jawab:

Faktor pendukung kegiatan kesetaraan Paket C terdiri dari faktor dana pendukung berasal BOP dan ketersediaan peluang pekerjaan dari perkebunan dan pertanian.

7. Apa saja faktor penghambat?

Jawab:

Faktor penghambat diantaranya adalah kondisi lokasi yang jauh dari kota Sintang sulit dijangkau oleh sarana transportasi sehingga waktu tempuh lama dan biayanya sangat mahal.

8. Faktor penghambat lainnya apa saja?

Jawab:

Faktor penghambat lainnya adalah karena faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan faktor kesadaran orang tua yang berasal dari pendidikan rendah maupun peserta belajar yang membuat motivasi untuk belajar sangat kurang.

Setahu saya ciri-ciri pembelajaran program Kesetaraan Paket C bersifat fleksibel baik tempat belajar, waktu belajar dengan menggunakan multi entri maka jadwal kegiatan juga disesuaikan dengan kondisi lokasi dan warga belajar program Paket C.

3. Dimana lokasi kegiatan program Paket C?

Jawab:

Kegiatan belajar dilaksanakan di SKB Kabupaten Sintang.

4. Apa saja kemudahan yang diterima oleh warga belajar?

Jawab:

Setahu saya kemudahan yang diterima mulai dari kurikulum lebih disederhanakan, warga belajar disediakan tempat menginap di asrama dan tidak dikenakan biaya/gratis.

5. Bagaimana pengaturan materi pelajaran?

Jawab:

Pengaturan materi sesuai dengan jurusan IPS dan mata pelajaran disediakan modul, agar siswa mudah menerima pelajaran

6. Jadwal pelajaran bagaimana mekanismenya?

Jawab:

Jadwal kegiatan dilaksanakan 3 kali seminggu karena warga belajar tidak bisa mengikuti setiap hari. Setiap harinya dilakukan pada siang hari hingga sore hari.

7. Apa saja faktor pendukung kegiatan tersebut?

Jawab:

Setahu saya faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana dari BOP dan ketersediaan asrama.

8. Bagaimana pelaksanaan evaluasi belajar?

Jawab:

Setiap warga belajar mengikuti ujian nasional berdasarkan jadwal yang tersedia.



9. Bagaimana minat masyarakat terhadap kegiatan Paket C?

Jawab:

Setahu saya masih banyak masyarakat yang berminat tetapi daya tampung tidak bisa menampung semua warga belajar yang berada jauh dipedalaman. apalagi lokasinya jauh.

10. Menurut Bapak apa saran yang diberikan kepada pemerintah?

Jawab:

Saran saya agar kegiatan dilaksanakan di lokasi yang terdekat di beberapa lokasi kecamatan dan dilaksanakan setiap tahun.

**F. Hasil wawancara dengan warga belajar Tursini.**

Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi saudara mengikuti kegiatan kesetaraan program Paket C?

Jawab:

Saya mengikuti program paket C karena putus sekolah. Lokasi rumah saya tidak ada SMA yang terdekat dengan kecamatan sehingga saya tidak bisa meneruskan sekolah

2. Bagaimana cara mendapat informasi program tersebut?

Jawab:

Saya mendapatkan informasi melalui kepala desa dan menyarankan kepada saya untuk meneruskan ke program paket C

4. Apakah saudara mendapat kesulitan mengikuti program paket C?

Jawab:

Tidak ada karena mata pelajarannya sudah disederhanakan apalagi tidak dipungut biaya.

5. Apakah saudara berasal dari desa yang jauh dari lokasi belajar?

Jawab:

Saya berasal dari desa terpencil dan menginap di asrama

6. Apa tujuan mengikuti program tersebut?

Jawab:

Tujuan saya agar bisa mendapatkan ijazah dan bisa melamar pekerjaan di perkebunan

7. Apakah teman saudara ada sudah yang bekerja?

Jawab:

Teman saya ada yang sudah bekerja dan mengikuti program untuk mendapatkan ijazah.

8. Berapa lama kegiatan program?

Jawab:

Setiap kegiatan dilaksanakan tiga tahun sebanyak 6 semester.

9. Apa saja yang membuat warga belajar kurang berminat mengikuti program?

Jawab:

Latar belakang keluarga warga belajar dalam kondisi ekonomi rendah dan kondisi geografis yang sangat jauh serta medan yang sulit membuat warga belajar kesulitan mengikuti program dengan sungguh-sungguh. Ada juga warga belajar yang kurang mempunyai motivasi yang kuat mengikuti program sehingga keaktifan belajar sangat kurang.

10. Bagaimana tanggapan saudara tentang program paket C?

Jawab:

Tanggapan saya adalah agar setiap program dilaksanakan di beberapa kecamatan yang disesuaikan dengan peserta warga belajar sehingga bisa menjangkau warga masyarakat yang terlatak didesa terpencil.

**G. Hasil wawancara dengan warga belajar Simon Petrus.**

Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi saudara mengikuti kegiatan kesetaraan program Paket C?

Jawab:

Saya mengikuti program paket C karena ingin mendapatkan ijazah

10. Apa harapan saudara?

Jawab:

Harapan saya agar program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang kurang mampu di desa terpencil.

UNIVERSITAS TERBUKA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**Universitas Terbuka**  
 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

Alamat : Jalan Karya Bhakti II  
 Pontianak - 78121  
 Telp : 0561-736107, 730291, 760791  
 Fax : 0561-736107  
 Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)

Yth : Kepala SKB Kabupaten Sintang  
 Jl. Sintang-Pontianak, Km.17  
 Kab. Sintang

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	Musriah	014944965	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009  
 a. Kepala UPBJJ-UT Pontianak  
 Kasubbag Tata Usaha  
  
 RAMAYANTI, S.IP.  
 NIP. 151 790 876



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  
KABUPATEN SINTANG**

*Jalan Sintang-Pontianak Km. 17 Sintang Kode Pos 78651*

**IJIN PENELITIAN**

Nomor : 890 / 180 / SKB – STG

Berdasarkan Surat Kepala UPBJJ- UT Pontianak Tanggal 04 April 2009 Tentang Permohonan Ijin Penelitian TAMP / Tesis, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Sintang.dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama	: Dra. Musriah
NIM	: 014944965
Program	: Magister Administrasi Publik
Perguruan Tinggi	: Universitas Terbuka

Untuk melaksanakan penelitian di Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) mulai tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan selesai.

Demikian Keterangan Ijin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

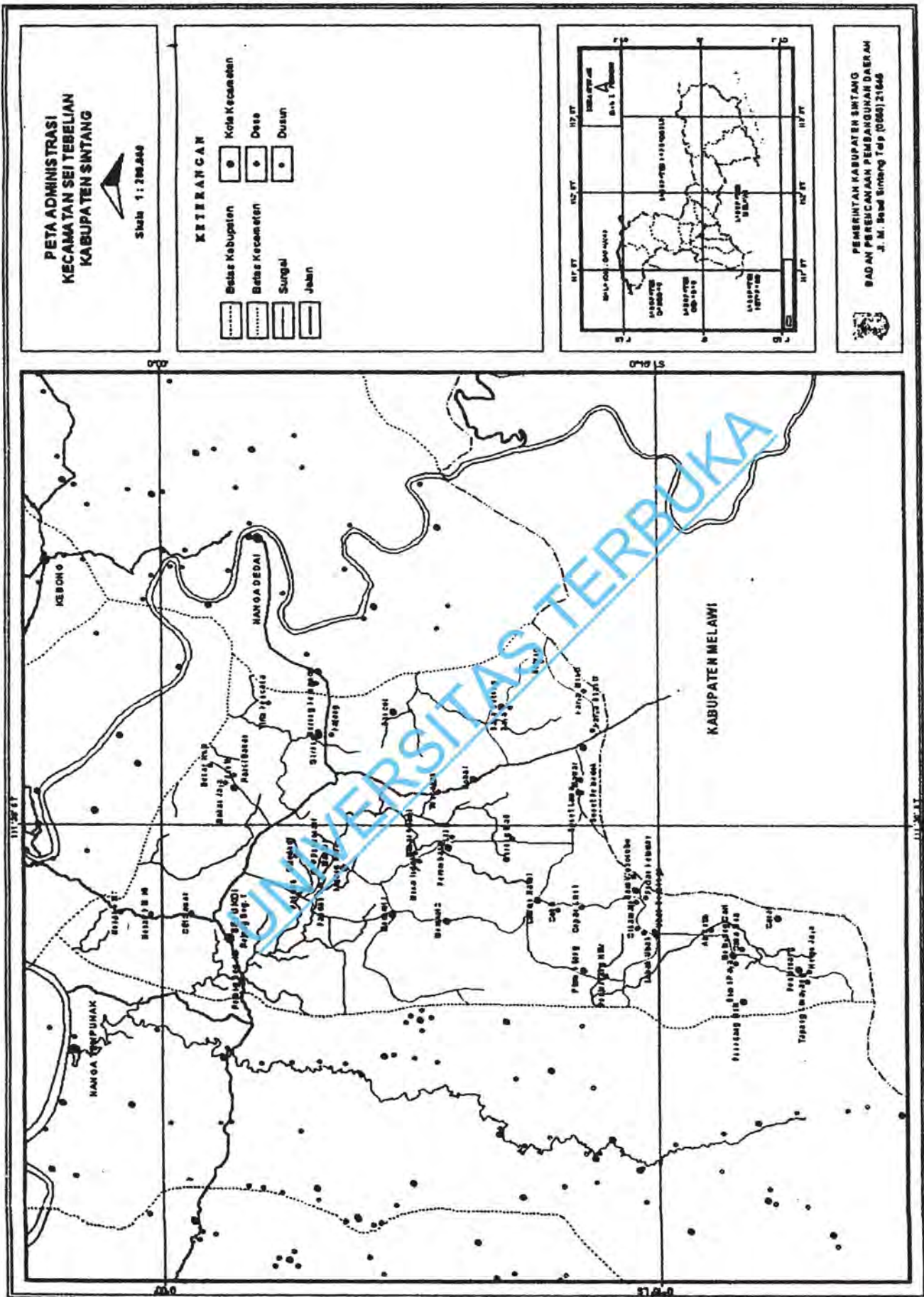
Sintang 1 Mei 2009

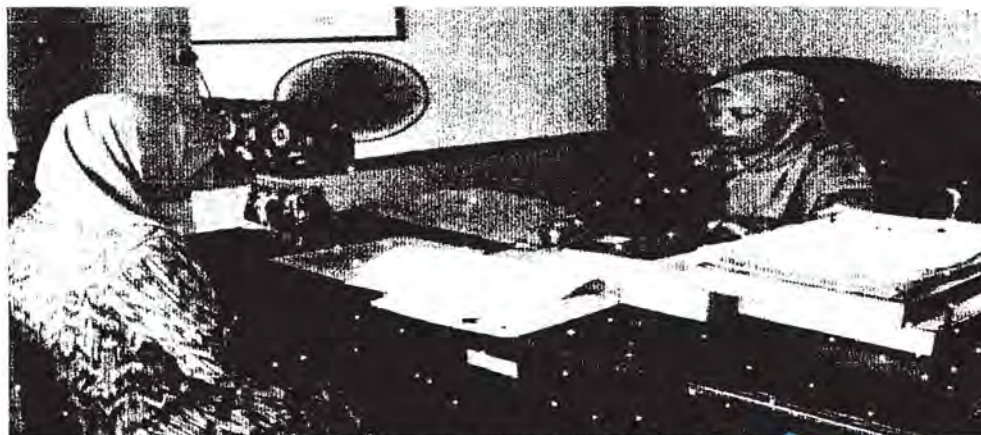


Kepala SKB Kabupaten Sintang

Dra. Misiani  
Penata TK 1

NIP. 19641021 199512 2 001

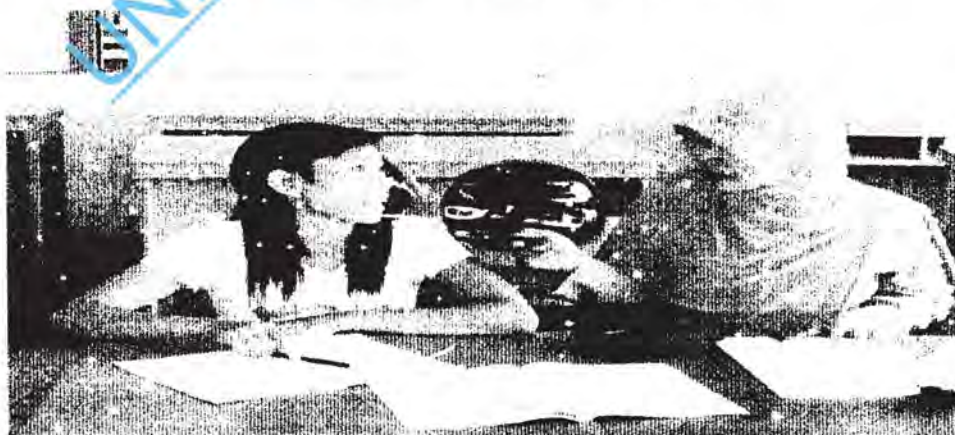




Wawancara Dengan Kepala SKB (Dra. Misiani)



Wawancara Dengan Tutor Paket C (Samiri)



Wawancara Dengan Warga Belajar Paket C (Tursini)



Wawancara Dengan Warga Belajar Paket C (Susana Sumi)



Wawancara Dengan Pamong Belajar SKB (Maman Kusmana, SP)



Wawancara Dengan Tutor Paket C (Darsono)





Wawancara Dengan Tutor Paket C (Suyati, S.Sos)



Wawancara Dengan Tutor Paket C (Kamidin, A.Ma.Pd)



Wawancara Dengan Warga Belajar Paket C (Simon Petrus)



Wawancara dengan Staf SKB (Ipin Ernawati)



Wawancara Dengan Pamong Belajar SKB (Sumadi, M.Pd)



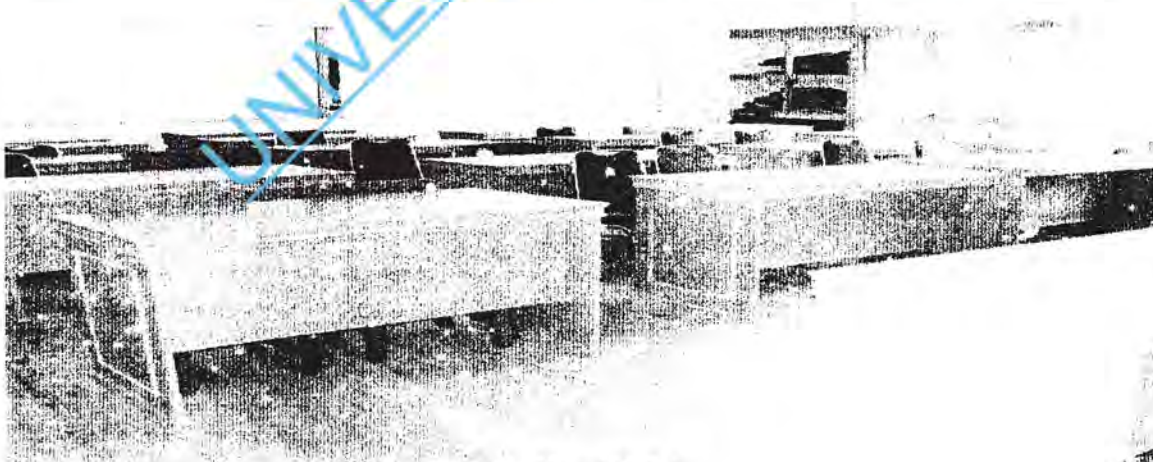
Pengarahan Warga Belajar Dalam Menghadapi Persiapan Ujian (UAN)



Foto Kantor SKB Kabupaten Sintang



Foto Inventaris SKB



Meja Kursi Belajar



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dra. Musriah

Lahir : Muncar, 17 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Kawin

Pekerjaan : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sintang

Alamat : Jalan MT Haryono BTN Cipta Mandiri 2 KM 5  
Blok B. No. 10 Sintang Kabupaten Sintang

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Olahraga

Suami : Bagiyo Sugiharto, SE

Anak : 1. Auliyak Sugiharto  
2. Nahdhiyah Ulya Sugiharto  
3. Aziza Sugiharto

Hobby : Membaca, memasak, dan mendengarkan musik